

## MENGENANG PERISTIWA 1965

Memasuki dan berada dalam bulan-bulan September dan Oktober setiap tahunnya, tidak sedikit orang, terutama para jompo yang nafasnya masih berulang-alik melalui hidungnya, kembali kepada ingatan, kenangan dan renungannya atas kejadian sejarah tanah air lebih setengah abad yang lalu, tepatnya tahun-tahun 1965/1966, dimana kekejaman, kebrutalan, pembunuhan atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kaum militer Angkatan Darat dengan mempergunakan tangan-tangan sebagian bangsa Indonesia yang tergabung dalam milisia dan organisasi komando aksi massa dan agama berlangsung dan merajalela. Ketika itu, bumi persada menjadi merah oleh darah bangsa Indonesia tak bersalah yang ditangkap, diperkosa bahkan dibunuh, tanpa mengingat harga diri dan nilai nyawa manusia, tanpa pemeriksaan benar salahnya. Nyawa melayang hanya dengan tuduhan dan anggapan “diduga” terlibat dengan G30S yang oleh penguasa dipopulerkan dengan sebutan G30S/PKI.

Sekitar tiga juta dibunuh, dan hampir 2 juta ditahan dalam kamp-kamp dan penjara serta sekitar 20 juta keluarga dan sanak saudara mereka hidup teraniaya dan dikucilkan, dianggap “tidak bersih”, sepertinya tiada hak untuk hidup sebagai manusia dan bangsa buat mereka dalam suatu negara yang merdeka yang penduduknya mayoritas menganut agama. Perempuan dan gadis-gadis diperkosa ramai-ramai oleh anggota milisia dan para preman, kemudian dibunuh dan mayatnya diklelerkan atau dibuang begitu saja, tanpa penguburan. Sungai-sungai dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang merapung tak bernyawa, di rawa-rawa dan selokan-selokan bertebaran mayat-mayat yang kadang-kadang tak berkepala yang dilemparkan setelah dibunuh dengan kejam.

Bau busuk dari bangkai-bangkai manusia yang dibunuh secara paksa tanpa salah dan tanpa proses pengadilan, dan dibuang begitu saja menjalar keseluruh kota atau desa. Ketakutan merebak di seluruh pelosok tanah air, karena kekejaman dan terror yang merajalela yang dilakukan dan direstui serta dilindungi oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat.

Aksi petualangan segerombolan militer yang bergerak melakukan penangkapan, penculikan dan pembunuhan atas 6 jenderal Angkatan Darat dalam suatu gerakan yang mereka namakan “Gerakan 30 September (G30S)” yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri, Komandan Tjakarabirawa yang adalah Pasukan Pengawal Presiden, yang berlangsung pada dinihari 1 Oktober 1965, dijadikan dasar dan alasan oleh Pangkostrad Letjen Soeharto dan para grupnya untuk secara mudah melakukan “pembalasan” dengan menjalankan pembunuhan massal atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia. Dengan dalih membasmi G30S, yang oleh Soeharto dan kliknya diplintir sedemikian rupa, direkayasa dan dituduh sebagai didalangi oleh PKI dan disebut serta dipopulerkan dengan sebutan G30S/PKI, dilangsungkanlah perburuan dan pembunuhan massal atau genosida yang terbesar setelah Perang Dunia ke-2, setelah Nazi Jerman, terhadap rakyat yang dituduh dan diindikasi berafiliasi kepada PKI.

Dengan pelarangan terbit semua media massa dan radio, dan hanya satu informasi dari Angkatan Darat melalui medianya yakni Berita Yudha, Angkatan Bersenjata, Api Pancasila, dan RRI, mulai 1 Oktober 65 itu, rakyat dijejali berita plintiran dan rekayasa Angkatan Darat yang mengatakan bahwa “G30S yang menculik, menyiksa dan membunuh para jenderal secara kejam dan biadab adalah didalangi oleh PKI” sehingga dengan demikian sepertinya memberi komando untuk membalas dendam kepada PKI. Apalagi, ketika Soeharto sebagai Panglima Kostrad memberi perintah kepada Kolonel Yasir Hadisubroto untuk “memburu dan membereskan” D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia dan Menko negara yang pada waktu itu berada di Jawa Tengah, maka para pengikut Soeharto, militer dan milisia serta kaum agama menganggap bahwa kata-kata Soeharto itu adalah sebagai aba-aba, sebagai tanda untuk melakukan perburuan dan pembantaian terhadap kaum komunis. Sehingga dengan demikian para bawahannya menjadi leluasa bertindak diluar perikermanusiaan. Nampak jelas, betapa licik Jenderal Soeharto melakukan hasutan dan kampanye

untuk Pembunuhan Massal terhadap kaum komunis Indonesia demi satu tujuan tertentu. Karena, jika Jenderal Soeharto mudah memerintahkan bawahannya untuk “membereskan” Menko Negara dan Ketua PKI, D.N. Aidit, maka para pengikut Soeharto, tentunya berhak untuk juga membereskan semua anggota dan simpatisan PKI. Dengan kelecikan Soeharto, hal itu diatur, seolah-olah sebagai suatu balas dendam rakyat terhadap PKI, sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh kemarahan rakyat karena penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat. Dan para pejabat Amerika, wartawan, dan para sarjana yang berhubungan dengan CIA menciptakan dongeng, bahwa pembunuhan berdarah itu adalah reaksi mendadak dari rakyat yang spontan terhadap terorisme dan kekajaman PKI. Namun, Sydney Morning Herald tanggal 10 July 1999 menulis: *“Secret records of the US State Department and CIA provide evidence that the massacre of Indonesia's communists in 1965 was not a result of spontaneous uprisings but a deliberate campaign by General”*. Bahkan Kolonel RPKAD Sarwo Edhi Wibowo yang terkenal sebagai ‘pembantai manusia’, mengatakan bahwa Rakyat di Bali harus dihasut, seperti juga di Jawa agar membunuh PKI, jika mereka sendiri tidak mau dibunuh. “Jika kamu tidak mau membunuh PKI, maka kamu akan dibunuh”. Dan Angkatan Darat mempunyai ‘milisia’ dari ormas-ormas pemuda agama yang bakal digunakan untuk ini, jika mereka tidak mau membunuh PKI.

Jadi ternyata, bahwa pembunuhan massal terhadap golongan PKI itu bukanlah suatu tindakan spontan rakyat akan tetapi suatu kampanye pemusnahan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto.

Soeharto nampaknya memang seorang militer yang cerdas, lihay dan licik, namun, kampanye Soeharto ini bukanlah sekedar keluar dari otak, atau kepandaian atau inisiatif Soeharto sendiri, akan tetapi berkat adanya usaha dan bantuan yang besar dari CIA/AS, karena memang itulah tujuan CIA/AS yang sesungguhnya, yaitu untuk menjatuhkan Soekarno, seperti diakui sendiri oleh Barack Obama, sebelum menjadi Presiden A.S. Dalam tulisannya: *“.....the CIA began providing covert support to various insurgencies inside Indonesia, and cultivated close links with Indonesia's military officers, many of whom had been trained in the United States. In 1965, under the leadership of General Soeharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their sympathizers. According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile”*

*(Barack Obama – THE AUDACITY OF HOPE. Thoughts on Reclaiming The American Dream, First published (2006) in New York, the U.S. by The Crown Publishers; Chapter 8, The World Beyond Our Borders, page 272-273. Paperback edition, by Canongates Book, 2008/Ibrahim Isa 08 November 2010)*

Dapatkah manusia Soeharto, seorang Letjen waktu itu, hanya dalam satu jam setelah kejadian, pada pagi hari 1 Oktober 1965 di Kostrad, mengatakan dan menetapkan bahwa G30S itu didalangi oleh PKI, tanpa penyelidikan dan pemeriksaan yang akurat? Ataukah memang Soeharto dan kliknya sudah “mempersiapkan” semuanya ini, sehingga tanpa ragu-ragu dengan gampang dia gampang dan begitu cepat menuduh PKI sebagai dalang G30S yang membunuh para top jenderal itu? Tidakkah ucapannya itu merupakan suatu pencetus dari sebuah ‘planning’ yang memang sudah lama digodok dan direncanakan serta disutradarai? Silahkan yang punya nalar memikirkan hal ini!

Melalui contoh, hasutan dan perintah Soeharto beserta kliknya, maka terjadilah pembunuhan massal diseluruh tanah air. Nyawa manusia menjadi tidak berharga samasekali. *“Penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua, setelah peristiwa 1965/1966 adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat”* begitu ucapan Nurkholis, Ketua Tim Investigasi Peristiwa 1965 Komnas HAM, pada 23/7/2012.

Soeharto bukannya menyelesaikan masalah yang terjadi namun justru menunggangi-atau menciptakan situasi untuk kepentingannya sendiri guna memenuhi pesananan sang majikan -

Amerika - yaitu menjatuhkan Soekarno dari kedudukannya yang memang tidak disukai Amerika.

Akibat dari rekayasa dan tipu daya Soeharto yang dibeking oleh medsos Angkatan Darat, disamping bedil dan bayonet militernya Pangkostrad Soeharto dan organisasi-organisasi milisia yang dibentuk oleh Angkatan Darat, rakyat dicekoki cerita-cerita plintiran agar bangkit untuk menghancurkan PKI. Agar Rakyat 'bisa' bangkit dan membantu Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI seperti yang dikehendaki Soeharto dan majikannya, maka Angkatan Darat menggiring rakyat untuk harus mempercayai dan mengikuti langkah-langkah mereka sbb.:

1. Mengindentikkan G30S dengan PKI;
2. Mengingkari kemanusiaan orang komunis, dan menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis;
3. Menyalahgunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis; dan
4. Menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan/atau pembasmian PKI.

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan meluap mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis dan anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti agama dan anti tuhan, kafir, yang darahnya halal dan segala macam lagi, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Api menyala. Darah pun tumpah. Terjadilah kejahatan kemanusiaan terbesar diabad ke duapuluh.

Pembunuhan massal di organisir dan terjadi secara sangat sistematis, seiring dengan pergerakan RPKAD dibawah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada bulan-bulan Oktober 1965 sampai Januari 1966.

Di Jakarta, rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dan etnik China, dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis, ditangkap dan diarak oleh demonstiran, dan dalam keadaan tak berdaya, di tengah-tengah massa demonstiran, korban ditusuk dan dibunuh dengan pedang panjang, sedang pihak militer hanya melihat dan menonton. (Riding TheTiger-Dokumen ABC-TV Australia)

Dimana-mana di bumi Indonesia, jasad-jasad tak bernyawa bergelimpangan di sepanjang jalan, bahkan ada yang sudah tak berkepala. Bagi mereka-para pembunuh haus darah-yang lupa kepada Tuhannya itu, nampaknya tidak merasa berdosa dan melanggar hukum jika menganiaya dan membunuh manusia selagi orang yang dianiaya dan dibunuh itu adalah anggota atau simpatisan atau yang bisa diindikasikan sebagai PKI. Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di *State Department's Bureau of Intelligence and Research* di tahun 1965 mendorong dan memberi semangat masyarakat dengan mengatakan: "*Tidak ada yang peduli, kalau mereka dibantai, asal mereka adalah komunis, tidak ada yang bakal menyelidikinya.*"

Masa 1965/1966 dan seterusnya, rasanya lebih berharga nyawa seekor anjing daripada seorang manusia yang dituduh komunis. "*Saya melihat banyak mayat yang rusak dan terpotong-potong, anggota tubuh, kaki, lengan, di sungai. Ini berlangsung hari demi hari, malam demi malam. Ratusan jumlahnya*". (Frank Palmos, koresponden Herald Sun 1962-1972, dari film documenter Shadow Play).

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato di depan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Bogor 18 Desember 1965. Bung Karno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. "Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati." Dengan kata-kata itu Bung Karno tentu tahu dan mengungkapkan bahwa orang yang coba ngrumat jenazah PKI ataupun yang tak mau membunuh PKI pasti akan dituduh PKI dan bakal dibunuh oleh Angkatan Darat dan

milisia ciptaan Angkatan Darat yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam dan Katolik.

Betapa kejam dan hebatnya pembunuhan massal yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan kaki tangannya, para milisia dan kaum yang mengaku beragama pada waktu itu. Bertrand Russel, pemikir besar Liberalisme, menyebutkan bahwa pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahluk yang bernama-pen] manusia. (Perang Urat Syaraf Kompas 9 Pebruari 2001) ***“Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun” (“In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years”).***

Ucapan Russel diatas dapat dipercaya dan diyakini dengan adanya Pengakuan Letjen Sarwo Edhi Wibowo Komandan RPKAD di depan Team Pencari Fakta, yang dengan bangga mengaku telah membunuh 3 juta orang komunis selama melampiaskan nafsu kedajalannya hanya dalam waktu 4 bulan, Oktober 1965 sampai Januari 1966, setelah dia selesai ‘military training’ di Australia tahun 1964. Rakyat tidak heran dengan pengakuan dan kebanggaan Letjen Sarwo Edhi Wibowo yang adalah Bapak Mertua Jenderal SBY, mantan presiden NKRI, karena pada waktu itu rakyat dapat melihat dan merasakan sendiri akan segala kedajalan dan kebiadaban Sarwo Edhi Wibowo bersama 400 prajurit RPKAD yang dipimpinnya, yang menjadikan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali banjir darah orang-orang tak bersalah yang dianggap sebagai PKI.

***Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, yang lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh menteri dalam negeri saat itu, Mayjen. Dr. Soemarno, dengan anggota-anggota: Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat S.H., Mayjen. Achmadi (eks. Brigade.XVII/TP), dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima RPKAD, kepada Permadi, S.H., jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3.000.000 (baca: tiga juta!) orang. “Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri,” kata sumber itu.***

Tiga juta dibantai dalam suatu Pembunuhan massal illegal yang tidak tercatat dan tidak terdaftar, melalui kampanye Soeharto dalam menerapkan taktiknya untuk tujuan yang lebih besar yaitu menggulingkan Permerintahan Soekarno. Lebih dari 2 juta ditangkap dan ditahan dalam Kamp-kamp tahanan di seluruh tanah air, dan lebih dari 12 ribu manusia yang “dibuang” kesuatu pulau yang disebut Pulau Buru untuk menjadi “santapan” penyakit dan kelaparan serta kekejaman dan aniaya yang dilakukan oleh para prajurit Angkatan Darat. Dan ribuan pemuda/pemudi Indonesia yang sedang belajar di Luar Negeri atas kiriman pemerintahan Soekarno dicabut status kewarganegaraan Indonesia mereka, sehingga terpaksa menjadi “orang gelandangan” atau “kaum klayaban” di negeri asing, menggapai-gapai mencari suaka.

Keberhasilan Soeharto membasmi dan menghancurkan PKI, satu partai komunis terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Uni Sovyet, suatu partai besar pendukung Bung Karno, dengan cara rekayasa dan tipuan licik dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, menjadikan kekuatan dan posisi Presiden Soekarno lemah dan goyah. Dengan taktik merangkak, *step by step*, setapak demi setapak, akhirnya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan, berhasil ditumbangkan oleh Jenderal Soeharto dengan tuduhan yang tidak pernah dapat dibuktikan, lalu menahannya dan akhirnya membunuhnya secara perlahan dalam tempat tahanan beliau di Wisma Yaso pada 1967.

Dengan cara-cara kekejaman diluar perikemanusiaan terhadap golongan bangsa Indonesia yang dituduh komunis, dan siapa saja yang menentanginya, Jenderal Soeharto Panglima Kostrad, tampil menjadi penguasa yang bertindak sebagai diktator fasis yang berhasil menganggangi Indonesia selama 32 tahun. Ucapan yang keluar dari mulut Soeharto yaitu “bereskan” ketika memerintahkan untuk memburu dan membunuh Menko Kabinet R.I./Ketua PKI D.N. Aidit, merupakan kata sakti dan jimat bagi para pengikut dan begundal sang fasis untuk melakukan pembersihan, pembunuhan

massal, genosida terhadap segenap pengikut dan simpatisan komunis dan golongan kiri lainnya, sehingga tidak heran kalau jutaan bangsa Indonesia lenyap dalam pembantaian tak terdaftar yang dilakukan oleh Militer dan para Milisia dari organisasi agama.

Jika setiap nyawa yang dilenyapkan, dibunuh, ditahan dan dicabut kewarganegaraannya oleh Soeharto, mempunyai ayah, ibu, saudara, saudari atau anak atau kemenakan atau sanak keluarga, maka berapa puluh juta manusia Indonesia yang menderita dan trauma karena terror yang dilakukan Soeharto? Pada waktu itu, tidak kurang 20 juta bangsa Indonesia menjadi korban kedajalan Soeharto, dianggap tidak “bersih lingkungan” sebagai bangsa Indonesia. Nah berapa jumlah keturunan mereka sekarang yang masih menderita, yang masih menjadi bangsa dan golongan terasing dinegeri tanah tumpah darah mereka?

Pada masa itu, jika tidak sempat dibunuh, mereka, para anggota komunis dan yang dituduh komunis ditangkap dan ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Kader-kader dan pimpinan PKI di pusat dan daerah-daerah yang ditangkap, dijatuhi “hukuman pengadilan” yang sudah dijatahkan oleh Soeharto, yaitu hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Dan bagi yang tidak “diproses hokum dipengadilan” langsung dibunuh dan dihilangkan.

Bahkan, yang dianggap berbahaya namun tidakdisidangkan karena jumlahnya terlalu banyak dan ketiadaan biaya serta tiadanya bukti palsu yang bisa dipersiapkan untuk sidang, mereka diasingkan, dibuang ke pulau terpencil yang bernama Pulau Buru, yang jumlahnya tidak kurang dari 12 ribu orang. Perilaku Soeharto ini, persis seperti perilaku Pemerintah Kolonialis Belanda pada tahun 1926 yang membuang dan mengasingkan para komunis dihutan belantara Boven Digul di Irian atau Papua yang kala itu bernama New Guinea yang secara geografis tidak jauh jaraknya dari Pulau Buru tempat Soeharto membuang para tahanannya. (Tidak heran, waktu Kolonialis Belanda menguasai Nusantara, Soeharto adalah Sersan KNIL, Tentara Kolonial Belanda).

Di Pulau Buru, dan lain-lain tempat di seluruh Indonesia, tidak sedikit para tahanan politik yaitu mereka yang dituduh dan dilibatkan kedalam G30S ini yang mati selama dalam masa tahanan yang bertahun tahun tanpa peradilan. Berbagai penyakit, kelaparan karena kurang makan, kerja paksa, pengambilan gelap di malam hari dengan istilahnya di “bon” atau dipinjam untuk diinterogasi, namun prakteknya dibunuh dan tidak tahu dimana kuburnya tetap berlaku sampai beberapa tahun. Sebagian yang sempat bisa bertahan dalam segala derita dan kekurangan, kendatipun dalam kondisi yang mengenaskan setelah mendekan belasan tahun dalam penjara atau tahanan, dapat keluar menghirup “udara bebas” disebabkan sedikit berobahnya situasi, yaitu desakan dari dunia luar melalui Palang Merah Internasional. IGGI dan HAM Internasional. Namun, mereka yang masih bisa keluar hidup dan katanya “dikembalikan ke masyarakat” itu tetap hidup terkucil, dianggap “berpenyakit” dan menyandang gelar yang populer yaitu “ET” yang diartikan “eks-tapol” dan harus dijauhi oleh “bangsa yang merdeka”. Bahkan segala macam peraturan, dikeluarkan oleh Pemerintah Soeharto untuk menekan dan mengucilkan serta membunuh perlahan-perlahan mereka yang terpaksa dilepaskan dari penjara/kamp konsentrasi. Yang sangat terkenal adalah Peraturan Menteri Dalam negeri Jendral Amir Mahmud No: 31/1981 yang memuat 9 macam larangan kegiatan dan kerja, “tidak boleh ini tidak boleh itu”, buat manusia yang dianggap tidak bersih, yaitu “eks-tapol” (E.T.) dan “terlibat secara tidak langsung dengan G30S/PKI. Predikat “terlibat secara tidak langsung” ini hebat sekali dampaknya. Ada 9 macam pekerjaan yang tertutup untuk mereka dan anak-cucunya pun terkena pembatasan untuk sekolah dan mencari pekerjaan bahkan untuk kawin! Seorang anak dari keluarga yang dicurigai ada indikasi dengan PKI, dilarang kawin dengan militer, polisi, ataupun pegawai negeri! Terlalu banyak istilah pada saat itu, seperti litsus, bersih diri, bersih lingkungan, serta keterpengaruhan. *“Persis seperti zaman fasis Dai Nippon, kalau dalam satu pasukan atau kampung ada seorang yang (dianggap) salah, maka semua kena sa-seng atau hukuman”* (catatan dari satu tulisan Ibrahim Isa, Alm.)

Dari satu tulisan almarhum A. Umar Said, yang menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Wartawan

Asia Afrika, seorang wartawan Nasional yang juga menjadi korban Soeharto dengan pencabutan hak WNI-nya, yang menghabiskan masa tuanya di Paris, Perancis, kita dapat baca: *“sebagian terbesar sekali di antara ratusan ribu eks-tahanan politik (eks-tapol) ini hidup sengsara sesudah keluar dari penjara atau tahanan, karena sulit sekali mencari pekerjaan dan hidup normal, atau mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak layak dari masyarakat atau aparat-aparat pemerintahan.*

*Banyak sekali dari begitu banyak eks-tapol ini sudah meninggal karena usia tua, dan karena kesulitan hidup, atau karena sakit. Mereka tidak mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Juga tidak dari sanak saudara atau kerabat, yang umumnya juga sudah sulit untuk hidup mereka sendiri, atau karena takut memberi bantuan.*

*Jadi, jumlah keluarga atau sanak-saudara (dekat maupun jauh) para korban pembunuhan dan pemenjaraan adalah besar sekali. Mereka ini banyak yang menjauhi atau putus hubungan dengan keluarga para korban Orde Baru ini. Dan keadaan demikian ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Bahkan, walaupun rejim militer sudah tumbang dalam tahun 1998, namun nasib sebagian terbesar para korban Orde Baru masih belum banyak berubah. Sampai sekarang!!!*

***Sampai sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembunyikan hubungan kekeluargaan mereka dengan para korban Orde Baru (anggota PKI, korban pembunuhan massal atau para eks-tapol). Padahal, mereka sama-sama tidak bersalah apa-apa sama sekali....!”***

Kurang lebih sepertiga abad Soeharto berkuasa, menjadi raja diraja atas bumi Indonesia. Selama 32 tahun dia berhasil merobah wajah Indonesia menjadi kacung dan budak serta menjual tanah air kepada Imperialis, dengan pertama sekali membuat dan menandatangani Undang Undang No. 1/1967 Soeharto mengundang semua imperialis dan kapitalis asing untuk masuk dan berpesta pora terhadap segala kekayaan alam bumi dan tanah air Indonesia. Semua yang dilakukannya berlawanan dan bertolak belakang dengan perjuangan para Founding Fathers dan tujuan Revolusi Agustus 1945. Indonesia jatuh kemulut Imperialis seperti yang lama mereka rencanakan sebelumnya dan Soeharto serta keluarga dan para pengikut dan begundalnya mendapat cipratan rezeki yang dilahap oleh Kapitalis Asing dari bumi tercinta Indonesia. Tidak salah kalau Imperialis sebelumnya pernah mengatakan bahwa ***“satu kali tembakan akan mengubah Indonesia”***.

Mereka-mereka yang kecipratan rezeki dan para kroni serta begundalnya mengatakan “enak” di jaman Soeharto, karena mereka bebas korupsi dan bebas melakukan segala kejahatan dan bebas membunuh lawan hanya dengan tuduhan “ada indikasi komunis”. Namun, sebagian besar rakyat hidup menderita, terkucil dan tidak ada harga sebagai bangsa apalagi sebagai manusia.

Di dalam negeri segala macam indoktrinasi, santiaji, pendidikan dan pemberitaan serta pemutaran film-film pemerintah yang mendiskreditkan satu golongan bangsa dan memusnahkan, menghancurkan leburkan PKI, partai yang sah menurut Undang-Undang dan yang menang dan menjadi Partai Besar Nomor 4 dalam hasil Pemilu 1955, terus menerus dilakukan, dijejalkan sebagai santapan rakyat. Dari mulai bayi hingga para jompo setiap malamnya dijejali dan dipaksa menyaksikan pertunjukkan film orba “Pemberontakan G30S/PKI”. Sejarah diputar balikkan. Semua diputar balik berlawanan dengan tujuan dan cita-cita Revolusi 1945. Soeharto menggunakan segala macam cara asal tujuannya tercapai. Dan semua itu dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan sang majikan yaitu imperialis Barat, terutama CIA/Amerika.

Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tujuh kali termen menjadi Presiden. Tujuh kali Pemilihan Presiden dengan calon Tunggalnya adalah dirinya sendiri. Dia bisa terus berkuasa karena di belakangnya adalah kekuatan militer yang punya bedil dan bayonet yang senantiasa mengintimidasi rakyat yang mencoba membuka mata dan bersuara, dengan tuduhan yang mematikan yaitu “antek

komunis”, “ada indikasi”, “tidak bersih” dlsb. Dan Partai Golkar, yang sejak semula adalah Partainya Soeharto juga melakukan penindasan terhadap rakyat dimana dalam setiap pilpres mengharuskan rakyat terutama pegawai pemerintah untuk memilih Soeharto/Golkar, dengan ucapan intimidasinya yang sangat terkenal yaitu “Jangan memotong tangan yang memberi makan”, sehingga rakyat, pegawai pemerintahan-yang sedikit melek-tidak bisa memilih lain selain Soeharto si calon tunggal, agar tidak dipecat dari pekerjaannya. Dan Golkar adalah Soeharto! Begitulah sang diktator, sang Jagal, bertahan dan berkuasa sampai 32 tahun, sehingga tiba masanya rakyat yang dikibuli merasa jenuh dan muak terhadap tingkah polah Si Jagal diktator Soeharto beserta seluruh keluarganya yang korup dan bertindak fasis. Seperti air di dulang yang coba ditekan, justru akan membasahi muka sendiri, begitulah yang terjadi.

Kebangkitan Rakyat, pemuda dan mahasiswa pada demonstrasi Mei 1998 menutup kekuasaan diktator militer Soeharto. Jenderal Bintang Lima Soeharto yang tangannya berlumuran dengan darah jutaan bangsa Indonesia, dipaksa turun dari jabatan kepresidenan dan “wakil presiden” (Habibie, wakil Soeharto waktu itu), dinaikkan menjadi Presiden.

Rakyat menganggap bahwa menurunkan Soeharto sebagai kepala Pemerintahan dan menggantikan dengan Pemeritahan Baru yang disebut Reformasi adalah satu kemenangan besar. Menurunkan dajal yang haus darah dan kekayaan dari singgasana, dengan korban nyawa pemuda yang tidak sedikit memang suatu perjuangan yang heroik. Salut dan penghargaan!

Namun, menggantikan Pemerintahan Orba/Soeharto dengan Pemerintahan Reformasi yang para pejabatnya ternyata masih merupakan orang-orangnya Soeharto, adalah satu kekeliruan. Rakyat, karena kegembiraan atas kemenangan itu mungkin lupa bahwa ”reformasi” yang berlaku begitu hakekatnya hanyalah sekedar re-formasi, menyusun kembali dan melakukan penggantian pejabat-pejabat dengan tokoh-tokoh baru, wajah-wajah baru, namun, percaya atau tidak, sistem yang dianut adalah meneruskan sistem Ordebaru Soeharto, karena semua pejabat yang duduk di pemerintahan dan dalam segala dewan-dewan adalah orang-orangnya orba Soeharto, tokoh-tokoh yang “dididik” Soeharto selama 32 tahun. Tidak ada perubahan dalam Politik, Hukum dan/atau Peraturan Negara. Jadi Reformasi yang berlaku bukanlah perubahan kepada pembentukan suatu sistem baru, namun sekedar pergantian atas manusia-manusia yang menjadi pejabat, sedang sistem yang diberlakukan adalah masih sistem orba, dengan arti kata lain: melanjutkan sistem orba, bahkan sampai sekarang. Apa yang tidak disukai Orba, menjadi apa yang tidak disukai oleh Reformasi, apa yang menjadi musuh Orba, juga menjadi musuh Reformasi, apa yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan Orba Soeharto, tetap dilanjutkan, didiamkan, bahkan coba ditutup dan dilupakan oleh Pemerintahan yang namanya Reformasi. Rakyat dibius dengan kata-kata reformasi yang prakteknya adalah mendudukkan kembali orang-orangnya Orba Soeharto yang belum mengenyam kursi empuk dalam Pemerintahan dan segala macam Badan kekuasaan, asal .....bukan Soeharto!

Karenanya, tidak heran dan kita bisa lihat, selama dalam masa pemerintahan reformasi suara mereka masih lantang menggaungkan suara Orba/Soeharto. Karena mereka hakekatnya tidaklain adalah “bebek-bebek” yang meneruskan kepentingan Soeharto. Seperti apa yang ditulis oleh H A. Mustofa Bisri, pengasuh pesantren Rodlatut Thalibin, Rembang, bahwa Soeharto, adalah: *“Jenderal terkuat yang saat berkuasa mampu menyihir banyak orang pintar menjadi bebek-bebek, meneluh wakil-wakil rakyat menjadi gagu, dan membuat pers tiarap sekian lama”*.

Dan “bebek-bebek, wakil rakyat yang kena teluh” itu sampai kini masih tetap berkuasa diatas singgasana, masih menjadi ‘pewaris’ dan masih tetap menyuarakan suara Soeharto, baik terang-terangan maupun secara berselubung dan membuat rakyat yang menderita makin menderita.

Namun, disamping itu kejatuhan Diktator Fasis Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, walau tidak membawa perubahan sistem pada pemerintahan, ada sedikit cahaya dan berkah bagi rakyat yang selama 32 tahun diburu dan ditindas, diintimidasi, karena mereka mulai bisa membuka mata

dan mulut dan meyuarkan tentang hal-hal yang selama dalam pemerintahan diktator Soeharto menjadi tabu dan pantangan untuk dibicarakan, karena penjara dan maut tantangannya. “Situasi yang dimulai dan berlangsung terus sejak gerakan massa reformasi dan demokrasi Mei 1998 telah secara formal mengakhiri rezim orde baru. Sejak Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto, sebagai presiden ke-3 Republik Indonesia, secara luas dan leluasa kesempatan demokrasi ini digunakan oleh para aktivis dan pejuang-pejuang reformasi dan demokrasi demi perubahan yang konsisten, untuk tegaknya negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. **Secara formal, rezim orde baru sudah runtuh, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebijakan politik dan tindakan penguasa tetap menolak rehabilitasi hak-hak kewarganegaraan dan hak politik jutaan korban Peristiwa 1965**”. (Sambutan Ibrahim Isa dalam buku Suar Suroso: Akar dan Dalang).

Timbulnya organisasi-organisasi yang membela rakyat yang menjadi korban dan mengungkap kebiadaban dan kejahatan kemanusiaan Jenderal Soeharto mulai nampak, didalam maupun diluar negeri. Rakyat yang menjadi korban kebiadaban Soeharto, mulai besuara, bertanya dan menyelidiki: Apakah benar bahwa G30S itu didalangi oleh PKI? Apakah benar bahwa PKI itu melakukan kudeta? Kalau dituduh bahwa PKI melakukan pemberontakan, mengapa jutaan anggotanya tidak bergerak melawan, bahkan diam menurut seperti ayam siap dibawa kepembantaian? Lagi pula, kalau mau berpikir, perlu apa PKI melakukan kudeta dan pemberontakan kalau partai itu sudah berada diambang kemenangan secara demokratis jika dilangsungkan Pemilu pada tahun 1965 atau 1966? Kalau semua kejahatan dan kedajalan tahun 1965 itu adalah perbuatan PKI mengapa tidak dilakukan peradilan YANG ADIL untuk melihat dan mendapatkan kebenaran. Mengapa semua tokoh PKI beserta 3 juta anggotanya dibunuh mati tanpa bisa membela diri? Mengapa semua tokoh-tokoh partai Islam yang dekat dengan PKI seperti KH Fatah Yasin, KH Sirajuddin Abbas pimpinan Partai Islam Perti dipernjarakan dan dimusnahkan oleh Soeharto. Mengapa? Ada apa dibalik semuanya itu? Jawaban singkatnya adalah karena Imperialis Amerika/CIA menginginkan Soekarno digulingkan dari Pemerintahan Indonesia, dan untuk itu, pendukung dan pembelan Bung Karno yaitu PKI dan PNI dan golongan revolusioner lainnya harus dihabiskan terlebih dahulu. Dan, Soeharto mendapat ‘tugas mulia’ dari Imperialis Amerika sehingga Indonesia menjadi porakporanda dan dikuasai Imperialis Amerika tanpa menggunakan dan mengorbankan kekutaan militer Amerika sendiri.

Rakyat mulai sadar bahwa Soeharto bersama kliknya telah memutar balik sejarah untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Busuknya, bahkan sampai mati, mereka yang melakukan kejahatan tidak mau mengakui kejahatannya, terutama Soeharto yang mati karena sakit otak. Kendatipun begitu banyak jumlah korban pembunuhan massal/genosida yang dilakukan oleh Angkatan Darat pada tahun 1965/66 itu, masih ada tokoh-tokoh dan para mantan jenderal militer dan orang-orang terkemuka yang pernah mengatakan bahwa “*Tidak ada Jenderal yang membunuh rakyatnya*” (Soetiyoso-myRMnews, 24 April 2008), “*Tidak ada genosida di Indonesia. Genosida itu, seperti yang terjadi di Jerman, Kamboja, Rwanda*”. (Wiranto-myRMnews 24/4/08). Bahkan mereka senantiasa meniupkan suara-suara bahwa Kejahatan HAM itu sebenarnya tidak ada, itu hanyalah dugaan dan tidak ada bukti samasekali. Bahkan ada juga tokoh yang tentunya melihat sendiri kenyataan itu, atau juga mungkin terlibat karena kedudukannya pada saat itu, namun coba menutup dan menyembunyikannya pernah berkata “*Peristiwa itu kan sudah lama perlu apa dibicarakan.*” (dari sebuah tulisan Ibrahim Isa yang menyitir ucapan seorang tokoh terkenal yang tahun 1965 adalah Ketua KAMI Indonesia Timur, Jusuf Kalla, wapres sekarang). Juga ucapan seorang tokoh Militer/Sipil yang terkenal, Mantan Presiden, yang mengatakan: “*Membicarakan G30S sebagai tidak produktif.....*” (SBY-RMMinggu, 01 Oktober 2006.). Bahkan baru-baru ini seorang Jenderal yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan NKRI, setelah setengah abad, masih berperilaku seolah-olah seperti ”maling teriak maling” dengan mengatakan bahwa “PKI sudah bunuh 7 jenderal, permintaan maaf tak perlu” (Ryamizard Ryacudu-Merdeka.com 19/8-2015).



Semua ucapan tokoh-tokoh itu adalah usaha-usaha licik para pengikut dan antek-antek Jenderal Fasis Soeharto yang masih duduk dikursi kekuasaan dalam baju “Reformasi” untuk menutup dan menghilangkan jejak kejahatan dan kebrutalan yang pernah berlaku di bumi tanah air.

Bahkan hingga kini, kendatipun Soeharto sudah lama mati, para pengikut dan kroninya yang tak ubahnya seperti kambing-kambing congek yang masih banyak menduduki kursi-kursi empuk di pemerintahan dan Partai, terbukti tetap berkaok-kaok membela sang majikan tercinta dan menutupi segala kejahatan dan kebrutalan rezimnya dari pengetahuan Rakyat, memutar balik sejarah, bahkan tak jemu-jemu dan tak henti-hentinya berkaok-kaok ingin mengangkat sidajal, sipembunuh zalim menjadi “pahlawan nasional”.

Namun, berkat tuntutan dan perjuangan yang tak henti-hentinya dari organisasi-oragnisasi dan yayasan-yayasan para korban orba/Soeharto, golongan yang dianiaya, para bekas tapolnya Soeharto dan para keluarga yang dikucilkan, karena selama puluhan tahun dianggap tidak bersih sebab dituduh terlibat langsung maupun tidak langsung dengan “G30S/PKI” yang jutaan jumlahnya, dan rakyat yang mulai melek dan bebas berpikir, akhirnya Komnas HAM, suatu Badan Hak Azazi Manusia yang dibentuk oleh Pemerintah R.I., setelah melakukan penyelidikan selama 4 tahun, yang dimulai tanggal 1 Juni 2008 sampai 30 April 2012, dengan memeriksa dan mewawancarai sejumlah 349 saksi yang mendengar, mengalami, hingga saksi yang patut dimintai pertanggungjawabannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua, dan setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, dari mulai keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 menyimpulkan bahwa **dugaan pelanggaran tersebut memang benar telah terjadi**, demikian penjelasan Nurkholis, Ketua Tim Investigasi Peristiwa 1965 Komnas HAM, menyatakan pada hari Senin 23/7/2012. **Penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua, setelah peristiwa 1965/1966 adalah merupakan pelanggaran hakasasi manusia yang berat.**

Adapun bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, lanjut Nurkholis, adalah ditemukan sejumlah peristiwa sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang diantaranya adalah **pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.** “Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa,” kata Nurkholis.

**Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa 1965/1966 Komnas HAM, Nurkholis, dalam jumpa pers di kantornya menyatakan bahwa salah satu unit negara yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah struktur Komando Pemulihan dan Keamanan (Kopkamtib) yang dipimpin oleh mantan presiden Soeharto, yang memimpin, menjadi Pangkopkamtib, dari 1965 dan 1967, serta antara 1977 dan 1978. Komnas HAM mendesak supaya para pejabat militer yang terlibat dibawa ke pengadilan.**

**“Kami meminta agar hasil penyelidikan ini ditindaklanjuti secara hukum oleh Kejaksaan Agung,”** ujar Nur Kholis sambil menyerahkan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM selama 4 tahun itu kepada Kejaksaan Agung RI pada 20 Juli 2013.

<http://www.voaindonesia.com/content/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-berat-padaperistiwa-1965-1966/1443521.html>

Kini, setelah 52 tahun peristiwa itu berlalu, setelah 52 tahun rakyat yang menjadi korban tetap

hidup dalam derita dan penuh intimidasi, masih mengalami trauma, masih saja ada para begundal dan pengikut Soeharto bergendang dan bernyanyi, bahkan mendendangkan lagu bahwa korban jiwa yang demikian banyaknya itu sebagai kesalahan PKI, bahkan ada yang mimpi dan mengatakan bahwa hal itu adalah sebagai suatu akibat dari “perang saudara”. Lebih jelek lagi, para pengikut Orba/Soeharto berusaha keras untuk menolak dan menjegal Pemerintah yang karena adanya segala macam desakan dianggap punya sedikit pemikiran untuk melakukan penyelesaian masalah HAM masa lalu, dengan segala dalih dan bermacam-macam cara, sehingga tepatlah seperti apa yang pernah ditulis oleh Ibrahim Isa: *“Ada yang tidak mau tahu tentang kasus 65 itu, karena dirinya atau golongannya sendiri, memang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ketika itu. Sebagian orang juga bersikap acuh tak acuh, karena bagaimanapun adalah berkat Orba, yang kayak apapun kejahatannya ketika itu, toh telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga mereka menjadi pejabat penting ataupun orang kaya sekarang ini. Jadi mereka-mereka itu bagaimanapun merasa telah ‘berhutang budi’ pada Soeharto, pada rezim Orba. Dan ada pepatah kita yang mengatakan ‘hutang budi dibawa mati’”*

Bung Karno, Bapak Bangsa dan Presiden Pertama R.I, pernah berkata: *“Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”* dan *“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari pada masa yang akan datang”*. (Pidato HUT Proklamasi 1966, Soekarno).

Ucapan beliau sesungguhnya benar! Bahwa sejarah adalah pengalaman masa lalu yang adalah guru untuk masa depan, menjadi bahan pelajaran, menjadi periskop untuk menuju dan menentukan arah dan masa depan. Namun, sejak sejarah adalah subjektif, ditulis dan dibuat mengikut kemauan pihak yang menang, pihak yang berkuasa dan menentukan, apakah kebenarannya bisa dijamin? Apakah sejarah yang selama ini harus dianut dan diikuti adalah benar?

Selama 32 tahun, Ordebaru Soeharto memaksakan sejarah untuk dimamah oleh generasi bangsa, dari mulai pelajar, pemuda pemudi, hingga sarjana, kaum cedekiawan bahkan alim ulama dan golongan agama dan partai serta pemerintahan terutama mereka yang lahir setelah 1965, tanpa pikir memamah apa yang disodorkan ordebaru yaitu masakan “instan-cook” yang dirasakannya sedap bahwa “G30S adalah Pemberontakan PKI, Pengkhianatan PKI “dan lain sebagainya. Bahkan golongan militer yang memang dididik untuk meneruskan mengunyah makanan sedap masakan Jenderal Soeharto dan kliknya, tetap lantang bersuara demi kepentingan mereka. Mata dan hati mereka dibutakan dan menganggap serta berpendapat bahwa segala apa yang disampaikan dan ditulis oleh ahli-ahli pengikut Soeharto dan Ordebaru, sebagai suatu kebenaran, tanpa mau melihat kenyataan bahwa semenjak Peristiwa 1965, semenjak kudeta Soeharto sampai hari ini, keadaan negeri tercinta bukannya bertambah baik malahan sebaliknya. Tanah, air dan udara bumi tercinta telah tergadai dan terjual, dan rakyat tidak punya apa-apa! Bahkan mereka tidak berkuasa atas dirinya sendiri, karena tubuh dan nyawa mereka telah tergadai kepada bank-bank internasional kaum imperialis sebagai jaminan pembayar hutang yang dibuat oleh Soeharto untuk kepentingan pribadi, sampai kepada penerus-penerusya sekarang.

Pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan tokoh-tokoh hipokrit atau munafik yang coba mengelabui rakyat dengan kepandaian bermain lidah dan berusaha menutup, memlintir dan melupakan sejarah masih sangat santer. Dengan menebar dan mengumbar kebohongan, mereka menelanjangi tubuh-tubuhnya sendiri, berlindung dibalik lalang sehelai dan mengingkari ucapan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia: *“Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah!”*.

Kendatipun generasi muda bangsa Indonesia yang lahir setelah 1965 tidak mengalami langsung Peristiwa yang meninggalkan trauma bangsa sampai sekarang, Peristiwa yang merobah jalannya Sejarah dan Revolusi Indonesia, Peristiwa yang menghancurkan luluhkan susunan dan tata kehidupan bangsa, masih banyak kaum muda yang tidak tinggal diam dan senantiasa belajar dan mencari

kebenaran sejarah Peristiwa 1965 yang menelan jutaan korban itu. Namun, pencarian mereka akan kebenaran sejarah itu terkadang terbentur kepada sikonnya, yaitu tempat dan situasinya ibarat **“seseorang yang menonton pertunjukan wayang kulit, tergantung dimana mereka berdiri atau duduk menyaksikan gambar wayang, didepan layar atautkah dibelakang layar bersama si dalang”** (mengutip kata perumpamaan dari Professor Jakob Sumardjo).

Banyak buku dan hasil riset bahkan pegalaman dari para korban Soeharto yang telah ditulis dan dicetak, juga yang disiarkan diberbagai milis dalam internet mengenai Peristiwa 1965 itu, dan tak ketinggalan juga film-film dokumentasi yang dibuat oleh orang yang peduli terhadap kebenaran sejarah, seperti film Jagal dan Senyap dan film-film dokumen lainnya. Namun, juga tidak sedikit tulisan-tulisan dari para “cerdik- pandai” yang mencoba menghapus dan mengengkari kebenaran serta bukti-bukti, dan berteriak mengelabui masyarakat dengan mengarang dan merekayasa sejarah (seperti Soeharto!) dengan menebarkan dongeng bahwa bukannya PKI yang dibantai, tapi “G30S/PKI” yang membantai para alim ulama dan kaum agama. Betapa mereka memutar balik kebenaran dan menipu sejarah.

Banyak korban Peristiwa 65 yang kini telah menua dan sakit-sakitan akibat kezaliman rezim Orba, dan yang kini hanya menunggu saat napas terakhir keluar dari hidungnya, namun mereka tidak mau tinggal diam dan berhenti menjadi saksi dalam mengungkap Peristiwa 65 yang menelan sangat banyak korban itu. Kendatipun mereka mesti menulis sambil tidur karena memang jompo lemah jasmani, dan berbicara terbata-bata karena penyakit, mereka tetap berusaha menjelaskan kebenaran sejarah yang selama ini diputar belokkan oleh rezim fasis orba Soeharto serta penerusnya. Mereka tidak akan pernah diam sampai napas terakhir meninggalkan hidungnya...!

Semenjak kejatuhan Soeharto tahun 1998, Indonesia yang beberapa kali telah bertukar pemimpin dan presiden, ‘mencoba’ untuk melihat dan menyelesaikan masalah Peristiwa 1965 yang begitu mengerikan, yang dampaknya masih terlihat sampai hari ini.

Dimulai dengan Presiden B.J. Habibie, yang langsung menjabat sebagai pengganti Soeharto, beliau tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini karena masa dan waktu jabatannya relatif singkat sekali. Presiden KH Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gus Dur, seorang Kiayi dari Partai Islam terbesar, NU, bukan saja ingin menyelesaikan masalah Peristiwa 1965 bahkan sebagai pimpinan NU meminta maaf kepada para korban G30S diseluruh Indonesia, bahkan telah menyatakan keinginannya untuk mencabut peraturan Soeharto yang diundangkan melalui MPR yaitu TAP/MPR/1966 No. XXV tentang pelarangan PKI. Namun sayang, pengikut-pengikut Soeharto yang masih berjubel dikelilingnya menjegal Gus Dur dan menjatuhkannya dari Kepresidenan. Presiden Megawati Soekarna Putri yang dipilih menggantikan Gus Dur, juga tidak dapat melihat dan menyelesaikan masalah Peristiwa 1965, karena masih banyaknya pengikut Soeharto yang berkuasa di Pemerintahan. Bahkan Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Megawati adalah Jenderal Susilo Bambang Yudoyono yang adalah mantu dari Jenderal ‘pembantai manusia’ tahun 1965/1966, yaitu Sarwo Edhie Wibowo. Bahkan Megawati sendiri tidak dapat bergerak untuk membela nama baik ayahnya sendiri Bung Karno, yang dianiaya oleh Soeharto melalui TAP/MPR XXXIII/1967. Dan akhirnya, dengan berbagai isu-isu miring terutama dari golongan agama, maka Megawati digantikan oleh SBY, mantan Menhamkam yang menang dalam Pilpres melawan Megawati. Kemenangan SBY-kendatipun sebagian golongan menyatakan karena penipuan IT-, membawa sedikit ‘harapan’ buat rakyat karena keinginannya untuk ‘menyelesaikan’ masalah tapol 1965 terutama dari Pulau Buru. ‘Keinginan’ yang diucapkan dan disiarkan oleh medsos ini, ‘disambut gembira’ oleh para korban kejahatan kemanusiaan 1965 yang lupa bahwa si penjahat kemanusiaan itu adalah Bapak Mertuanya SBY sendiri. Para korban lupa, apakah ‘menantu berani untuk memproses bapak mertuanya’....? Akhirnya kita lihat kenyataan dan buktinya akan ucapan SBY bahwa “membicarakan masalah G30S sebagai tidak produktif”, dan G30S dan janji penyelesaiannya dianggap sebagai bola ditendang kesana kemari sampai akhir masa jabatan beliau duduk disinggasana 10tahun yang dipenuhi segala macam janji palsu.....!

Nah tiba masanya putra Solo, mantan Walikota Solo yang terpilih menjadi Presiden R.I. Beliau juga

berjanji untuk melihat dan menyelesaikan masalah Peristiwa 1965. Akan tetapi, begitu dia menyatakan ingin ‘menyelesaikan’, begitu segala macam tembakan bertubi-tubi kearahnya dari segenap jajaran anakbuahnya, menteri-menterinya, tokoh-tokoh politik dan masyarakat dan siapapun yang anti dan tidak menyukainya. Bahkan lebih jelek lagi, orang yang lahir tahun 1961, yang besar serta dewasa dan mengenyam pendidikan dalam sistem Orba ini, dituduh sebagai PKI, bahkan harus di test DNA-nya, seolah-olah PKI atau komunis itu adalah sesuatu yang bisa ditest melalui DNA.....! Betapa bebalnya manusia Indonesia yang punya pikiran demikian....!!!

Dapatkah politik seseorang dilihat dan ditentukan dengan memeriksa DNA nenek moyangnya? Sebagai contoh: Mailan, seorang perempuan keluarga Ningrat, anak dari Ki Agus Haji Abdul Rahman, seorang tuan tanah kaya, menikah dengan Abdullah, anak Haji Ismail yang juga adalah seorang anak tuan tanah. Si anak menjadi pengusaha ikan yang makmur dan ikut membesarkan organisasi keagamaan yang bernama “Nurul Islam”. Dari perkawinan Mailan dan Abdullah lahirlah beberapa anak yang satu diantaranya diberi nama Achmad yang ketika baliq menjadi tukang azan dimesjid. Nah, dapatkah dilihat dari DNA Mailan dan Abdullah (ibu dan ayah) akan politik apa yang bakal dianut anaknya, si Achmad kelak setelah dewasa? Tidak mungkin, dan tidak bisa samasekali, karena DNA bukanlah untuk menentukan politik keturunan. Dan tahukah anda, bahwa Mailan anak ningrat dan tuan tanah kaya raya bersama Abdullah, suaminya, seorang pengusaha yang makmur, pembina organisasi “Nurul Islam” dan anak dari si tuan tanah yang kaya raya, menghasilkan anak si Achmad yang menjadi komunis kawakan yang kemudian dikenal dengan nama D.N. Aidit? Tahukah Anda akan hal itu? Sekali lagi perlu saya ulangi: Dapatkah politik seseorang dilihat dan ditentukan dengan memeriksa DNA nenek moyangnya?

### **G30S – Gerakan Tigapuluh September dan GESTOK - Gerakan Satu Oktober**

Siapa bangsa Indonesia yang tidak tahu atau tidak pernah dengar sebutan G30S? Apalagi kalau dilengkapi dengan embel-embel PKI menjadi G30S/PKI. Semua yang bernyawa di Indonesia tahu sebutan G30S/PKI. Apalagi PKI yang dianggap sebagai pewaris tunggal gerombolan militer G30S. Atribut kejahatan, kebiadaban dan kekejaman militer Angkatan Darat yang tergabung dalam gerombolan G30S, dengan rekayasa dan tipu daya licik Soeharto dipasangkan kepada sebuah partai besar PKI, sehingga PKI mendapat tuduhan segala macam kebusukan, kejahatan dan kebiadaban dan kedajalan sedemikian rupa. Bukan saja dalam pikiran atau ucapan, namun juga dalam undang-undang negara. Begitulah mahakarya Jenderal Soeharto selama menguasai Indonesia 32 tahun lamanya. Dan Soeharto ‘mewariskan’ karya busuknya itu buat bangsa Indonesia yang masih tetap percaya dan mengamininya sampai sekarang.

Namun, apakah semua bangsa Indonesia tahu apakah sebenarnya G30S yang dikaitkan dengan PKI itu?

Menurut berbagai dokumen dan informasi medsos yang dapat dikumpulkan, pada dinihari, Jumat 1 Oktober 1965, adalah merupakan pagi dan hari yang kelabu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di subuh pagi itu, sekelompok perwira muda Angkatan Darat, melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September, dibawah pimpinan Letkol. Untung Samsuri, Komandan Yon I Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden; Kolonel A. Latief, Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya dan Brigjen Supardjo, dengan menggunakan militer bawahannya, bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga tergabung dalam organisasi “dewan jenderal” dan bakal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan Pemerintahannya. Penangkapan dan penculikan yang katanya bertujuan untuk membawa dan menghadapkan para jenderal Angkatan Darat itu kepada Presiden Sukarno, ternyata berobah arah dan berakhir dengan pembunuhan yang mengenaskan terhadap para jenderal yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya, di daerah Kebun Karet Pondok Gede Jakarta.

Enam Jenderal dan seorang Perwira menengah menjadi korban di malam dan pagi naas itu. Mereka adalah: Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; Mayjen. Suprpto, Asisten II Men/Pangad; Mayjen. Haryono M. T., Asisten III Men/Pangad; Mayjen. S. Parman, Asisten I

Men/Pangad; Brigjen. D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad; Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil lolos, namun ajudannya, Letnan P. Tendean, dan anak Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban.

Sebelum orang tahu apa yang terjadi, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh KSAD Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Markas Kostrad. **Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, mendengar kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta merta Yoga Sugama menyatakan bahwa “hal itu pasti perbuatan PKI”.** Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 pagi, menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung, maka Yoga Sugama-pun memerintahkan, **“Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”.** Yoga Sugama mengucapkan kesimpulannya itu, karena Untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP II Bukittinggi waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatra Barat dan dianggapnya sebagai kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA, dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu. **Beberapa jam setelah para jenderal diculik dan dibunuh, kelompok bayangan Soeharto ini, Yoga dan Ali, langsung mengumumkan rekayasa dengan mengatakan “G30S didalangi PKI”.** Lantas Soeharto memberi bumbu dengan memerintahkan: **“Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian”.** Dan tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, kontan saja di belakang kata G30S diberi embel-embel PKI, hingga menjadi G30S/PKI dan menjadi buron.

Jenderal Soeharto yang ketika itu adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), dalam kesempatan itu, dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, **“Apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini?”** Lagi, tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan, Yoga Sugama yang Ass.I Kostrad/Perwira Intelijen langsung dan enak saja menjawab: **“Ya”.** Jawaban spontan yang tanpa penyelidikan, tanpa bukti dan fakta ini, menuduh Presiden/Pangti ABRI Bung Karno sebagai terlibat dengan gerakan para militer muda itu.

Para pembaca yang arif bijaksana, silahkan lah mempertimbangkan ucapan-ucapan para jenderal Yoga Sugama, dan Ali Murtopo dan Soeharto sendiri dalam memutuskan dan menentukan siapa G30S itu tanpa pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Ada apa dengan semua ini? Mereka berkata dan memberi jawaban seandainya dan spontan seolah-olah semua itu sudah diatur terlebih dahulu, sudah direncanakan dan sudah distel sebelumnya, sehingga ketiga ‘sutradara’ ini bisa berkata dan berbicara satu nada...! Bahkan ketika Yoga Sugama meng ‘ya’ kan ‘keterlibatan’ Presiden Soekarno dalam G30S itu, Soeharto sangat berbesar hati karena beberapa hari sebelumnya Soeharto pernah mengatakan kepada Kolonel A. Latief bahwa dia ‘Menghendaki Presiden Soekarno Diganti’. Soeharto tersenyum dengan jawaban Yoga Sugama itu dan yakin bahwa rencananya pasti akan terlaksana karena “sepertinya mendapat dukungan dari bawah”.

Nah sebagai seorang yang ingin tahu kebenaran apa yang telah terjadi, tidakkah kita ingin juga mengetahui, mengapa ketiga jenderal Kostrad itu begitu cepat dan mudah memberi jawaban senada satu sama lain atas situasi nasional yang sangat besar itu tanpa pemeriksaan dan penyelidikan yang serius dan teliti terlebih dahulu? Mari kita telusuri:

**Pertama :** Dengan issue panas yang melanda Jakarta bahwa para Jenderal (yang disebut “Dewan Jenderal”) akan melakukan Kudeta terhadap Bung Karno, situasi ekonomi, situasi sakitnya Bung Karno dan adanya Dokumen Gilchrist, “Tiga minggu sebelum meletusnya G30S, Letkol. Untung dan Kol. Latief masing masing sebagai Komandan Batalyon 1 Cakrabirawa dan Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, sudah merundingkan dengan Soeharto langkah-langkah yang perlu diambil, sebab Untung dan Latief kedua-duanya bekas anak buah Soeharto dan persahabatan mereka terus berkelanjutan.”

**Kedua :** “Menurut Brigjen Supardjo, tanggal 16 September 1965 telah terbentuk susunan untuk

suatu gerakan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, untuk menyelamatkan Bung Karno dan menggagalkan kudeta dewan jenderal yang diduga akan berlangsung pada 5 Oktober 1965. Kolonel Latief, yang adalah Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, semula keberatan Letkol. Untung menjadi pimpinannya dan meminta supaya gerakan dipimpin seorang jenderal. Tetapi karena Kamaruzaman (Syam) mempertahankan supaya tetap Untung, karena ia adalah pengawal presiden, maka akhirnya Letkol. Untung yang memimpinnya.”

KOLONEL A. Latief, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, salah seorang pemimpin gerakan, dalam kesaksiannya mengatakan: “Dari sekian banyak kunjungan, seingat saya sekitar tanggal 18 September 1965 saya sekeluarga berkunjung seperti biasanya ke rumah keluarga Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jalan Agus Salim, Jakarta. Dalam kesempatan berdua, saya bertanya kepada Jenderal Soeharto: *‘Apakah benar ada Dewan Jenderal AD yang hendak melakukan kup merebut kekuasaan dari tangan Presiden RI Bung Karno?’* Jenderal Soeharto menjawab: *‘Ya, saya sudah tahu dan sudah mendengar dari bekas anak buah Mayor CTN/Vet. Soebagyo dari Yogyakarta.’* Saya bertanya lagi: *‘Siapa jenderal itu dan di mana?’* Jenderal Soeharto menjawab lagi: *‘Akan diselidiki dulu.’* Mendengar jawaban Jenderal Soeharto demikian, saya berkata kepada Jenderal Soeharto: *‘Kalau benar ada yang mau kup terhadap Presiden RI Bung Karno, saya siap menghadapinya!’*”

**Ketiga :** Sebelum “gerakan” itu melancarkan aksinya, Letkol. Untung yang tidak asing bagi Soeharto, mendatanginya dan melaporkan rencananya. Soeharto mengatakan sikap itu sudah benar. *“Bagus kalau Kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu,”* demikian kata Soeharto menurut Letkol. Untung, seperti yang diceritakan kepada dan kemudian dikisahkan kembali oleh Subandrio, yang selama orba ditahan bersama Letkol. Untung. Malahan, menurut penjelasan Untung, Soeharto menawarkan bantuan pasukan. *“Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.”*

**Keempat :** Selaku Panglima Kostrad, Soeharto memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulangnya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad, diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.

Kelima : Kol. A. Latief menceritakan: “Seperti biasanya pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari), saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jalan Agus Salim Jakarta”. Dari dua kali kunjungan ini yang barangkali disatukan oleh Latief dalam pledoinya ketika ia dihadapkan ke mahmilub pada tahun 1978, yaitu:

*“... Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di rumah Jl. H. Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad, di samping acara keluarga, saya juga bermaksud: ‘menanyakan dengan adanya info dewan jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.’ Oleh beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta, bernama Soebagyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD yang akan mengadakan coup d’etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan. Oleh karena itu tempat/ruangan tersebut banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan dalam soal-soal lain, antara lain soal rumah. Saya datang ke rumah Bapak Jenderal Soeharto bersama istri saya dan tamu istri saya berasal dari Solo, Ibu Kolonel Suyoto dan dalam perjamuan di ruangan beliau ada terdapat Ibu Tien Soeharto, orang tua suami-istri Ibu Tien, tamu Ibu Tien Soeharto berasal dari Solo bersama Bapak Dul dan Ibu Dul, juga termasuk putra bungsu*

*laki-laki Bapak Jenderal Soeharto, yang kemudian harinya ketimpa sup panas.”*

Dalam pengakuan tambahan yang diberikan oleh Kolonel Latief pada tahun 2003, dikatakannya: “Di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto *menghendaki* (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden Soekarno diganti, karena selalu membikin ribut. (sejalan dengan garis CIA/Presiden Amerika Eisenhower 25 September 1957-pen). Saya jawab: ‘Tidak mungkin, karena Bung Karno didukung rakyat!’

**Keenam** : Kolonel Latief memberi kesaksian: “Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 09.00—10.00 (siang hari) saya menemui Jenderal Soeharto yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, di situ saya melapor kepada Jenderal Soeharto, bahwa kami akan menculik para jenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Pangti-ABRI Presiden Soekarno, dan yang akan dilaksanakan besok malam (sehari berikutnya) tanggal 30 September 1965; Menanggapi laporan saya itu, Jenderal Soeharto bertanya: ‘Siapa komandan operasinya?’ Saya jawab: ‘Letkol. Untung’ (yang saya mengetahui Letkol. Untung telah dikenal baik oleh Jenderal Soeharto). Seterusnya Jenderal Soeharto lalu berkomentar: ‘Ya sudah, saya mau istirahat.’ Selanjutnya kami berdua berpisah.”

**Ketujuh** : Pada tanggal 30 September, jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief mengunjungi Jenderal Soeharto di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi “gerakan” yang bakal dimulai empat jam lagi. Soeharto kala itu berada di rumah sakit, menemani istrinya menunggu anaknya yang sedang dirawat karena tergujur sup panas. Inilah kontak terakhir pelaksana gerakan, untuk melaporkan bahwa akan segera dilaksanakan (4 jam kemudian), yang diterima Soeharto dengan penuh keseriusan.

**Kedelapan** : Menurut seorang saksi, segera sesudah itu Soeharto segera berangkat ke Kostrad untuk konsolidasi pasukan dan keliling kota melihat-lihat keadaan, lewat di depan RRI, kantor Telkom, dan TVRI.

Silahkan.... Stop Sebentar...! Setelah melihat bagaimana ‘hubungan’ antara Untung, Latief dan Supardjo dengan Soeharto dan melihat pertemuan-pertemuan dan pembicaraan mereka, bagaimana pertimbangan Anda? Apakah Anda akan mengatakan bahwa Soeharto tidak ada sangkutpautnya dengan Untung, Latief, Supardjo dan gerakan mereka, tegasnya dengan G30S? Mari, silahkan berpikir secara logika....!

### **Penculikan**

Sesuai dengan apa yang mereka bicara dan rencanakan, maka setelah Kolonel Latief menemui Soeharto di RSPAD, lewat tengah malam 30 September, pada subuh hari 1 Oktober 1965 terjadilah penculikan para jenderal untuk dihadapkan kepada presiden, yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, yaitu:

1. Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat
2. Mayjen. Suprpto, Asisten II Men/Pangad
3. Mayjen. Haryono M. T., Asisten III Men/Pangad
4. Mayjen. S. Parman, Asisten I Men/Pangad
5. Brigjen. D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad
6. Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil meloloskan diri, namun ajudannya, Letnan P. Tendeau, dan anak Jenderal A.H.Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban.

Penangkapan dan penculikan anggota dewan jenderal, yang semula mereka rencanakan untuk “dihadapkan kepada presiden” berlangsung dan berakhir dengan pembunuhan. Para jenderal yang mereka culik dan bunuh, mereka bawa ke suatu tempat yang bernama Lubang Buaya di daerah Pondok Gede. “Lubang Buaya” Pondok Gede ini, menurut penuturan Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang seperti yang diceritakan dalam Kesaksian Pangau Omar Dhani, adalah tanah

milik Angkatan Darat. “Tanah tempat pembunuhan itu milik Kodam. Kebun Karet yang sekarang untuk monumen itu adalah wilayah Angkatan Darat sendiri.” Banyak orang tidak tahu bahwa ada dua tempat yang bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya lokasi tempat pembunuhan para jenderal itu adalah Lubang Buaya di daerah Kebun Karet Pondok Gede, yang tidak termasuk wilayah Halim Perdanakusuma dan jaraknya jauh sekali (3½ km) dari Lapangan Udara Halim. Sementara, Lubang Buaya yang sehari-hari dikenal warga AURI di Halim adalah wilayah untuk ‘*dropping-zone*-pendaratan terjun payung. “Yang kami namakan Lubang Buaya itu adalah lapangan golf di Halim sekarang. Namun Kostrad menyebarkan opini sedemikian rupa hingga rakyat yang tidak tahu menganggap bahwa Lubang Buaya tempat pembunuhan jenderal itu berada dalam wilayah AURI, padahal yang sebenarnya adalah Lubang Buaya Pondok Gede, milik dan wilayah Kostrad,” demikian penjelasan Omar Dhani.

Hal ini bisa menjadi lebih jelas sekali, karena sebelumnya, ketika Pangkostrad menerima kedatangan pasukan Yon 454 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya serta pasukan 328 Siliwangi, pada tanggal 30 September 1965 jam 17.00, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.

Apakah Soeharto mengirimkan pasukannya, Yon 454, ke “Lubang Buaya” di daerah AURI? Tentu tidak, bukan? Mustahil bagi Kostrad untuk memerintahkan pasukannya masuk dan bergabung dengan pasukan lain ke suatu tempat yang bukan daerahnya, ke daerah yang berada di bawah kuasa angkatan lain? Jadi, hal ini dapat dilakukan oleh Soeharto, karena Lubang Buaya di Pondok Gede, di mana Yon 454 “bergabung dengan pasukan lainnya” adalah milik Kodam Jaya dan berada di bawah pengaturan Kostrad. Dengan demikian Pangkostrad sewaktu-waktu tentu akan mudah melakukan kontrol, apa dan bagaimana yang terjadi dengan pasukan Kostrad Yon 454 yang ada di Lubang Buaya.

**Nah, jelas siapa yang menggerakkan dan ikut ambil bagian dalam gerakan kelompok gerombolan militer G30S ini, bukan? Mereka adalah Letkol Untung, Kolonel A. Latief, Brigjen Supardjo dan Letjen Soeharto!**

“Belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan mana pun, baik dalam Perang Dunia pertama, maupun Perang Dunia kedua, Perang Korea, maupun dalam Perang Vietnam, sekian banyak perwira tinggi, pucuk pimpinan Angkatan Darat terbunuh dalam satu peristiwa, dalam satu malam. Dan peristiwa ini disusul oleh penangkapan dan pemenjaraan besar besaran tanpa melalui pengadilan. Berlangsung pembantaian manusia, pembasmian kaum kiri, pelarangan Partai Komunis Indonesia, pelarangan penyebaran Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia. Malapetaka melanda Indonesia. Lebih mengerikan dari Nero membakar Roma, melebihi korban bom atom menimpa Hiroshima, lebih dahsyat dari pertempuran Stalingrad yang jadi titik-balik Perang Dunia kedua, lebih menegakkan bulu roma dari Perang Korea dan Perang Vietnam. Indonesia berlumuran darah. Manusia tak berdosa, yang tak melawan dibunuh secara semena-mena. Mayat-mayat bergelimpangan, berhanyutan di Bengawan Solo, di Sungai Musi, di Sungai Asahan, dan sungai-sungai lainnya. Bertebaran kuburan tanpa nisan. Terjadi pembantaian manusia yang tak ada taranya dalam sejarah Indonesia, bahkan dalam sejarah dunia. Inilah muara dari rencana Sang Angkara Murka, demi menggulingkan Bung Karno” tulis Suar Suroso dalam bukunya ‘Akar dan Dalang’. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.186.)

Presiden Soekarno yang berada di Halim pada pagi hari itu dan mendengar gugurnya para perwira tinggi AD, tidak mau mendukung G30S dan memerintahkan Brigjen Supardjo menghentikan gerakannya, dan Supardjo sebagai militer mematuhi Perintah Presiden/Pangti ABRI ini. Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti ABRI, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, mengeluarkan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang menyatakan: “*Pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro Ass*



*III/Pangad*". Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan ajudan beliau Kol. KKO Bambang Widjanarko memanggil Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap.

Akan tetapi, pada jam 9.00 pagi hari itu juga, dalam rapat yang berlangsung di Markas Kostrad, di bawah pimpinan Letjen Soeharto selaku Panglima Kostrad, setelah mengetahui bahwa Letjen A. Yani Menpangad telah terbunuh, Soeharto dengan mengabaikan dan menjegal perintah dan keputusan Presiden/Pangti ABRI, "mengangkat dan menetapkan dirinya" sebagai Panglima Angkatan Darat. Soeharto membantah dan melawan Perintah Pangti ABRI.

Ketika Ajudan Presiden Kol. KKO Bambang Wijarnako datang ke Makostrad menyampaikan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, meminta Pranoto Reksosamudra dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap Presiden, disambut oleh Pangkostrad Jenderal Soeharto dengan angkuh dan galak, sambil mengatakan kepada kurir Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda: "Jendral Umar blijft hier" (Y. Pohan: "Siapa yang melakukan kudeta.....").

Dengan perilaku Soeharto dan kejadian **pada pagi hari 1 Oktober itu, maka mulailah gerakan perlawanan pembangkangan dan pengengkaran perintah Pangti ABRI/Presiden Soekarno oleh Letjen Soeharto.** Lebih jauh lagi, bahkan lewat kurir pribadi Ajudan Presiden Kol. Bambang Wijarnako tersebut, Soeharto memberi "perintah dan petunjuk" kepada Presiden/Pangti ABRI Soekarno, agar segala persoalan yang menyangkut militer harus melalui dirinya, Pangkostrad Letjen Soeharto. Tapi sayang sekali, nampaknya Bung Karno pada hari 1 Oktober 1965, sebagai Pangti ABRI, sepertinya tidak punya cukup keberanian untuk melakukan tindakan penghukuman atas pembangkangan dan perlawanan Letjen Soeharto kepadanya, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Andai saja, Bung Karno berani dan memecat Soeharto yang membangkang, maka pasti Indonesia tidak akan hancur dan poranda ditangan petualangan, koruptor dan fasis licik Soeharto. Kalaupun ada perlawanan, tentu hanya terbatas kepada Grup Soeharto yang jumlahnya bisa dihitung. Siapakah yang mau dan bakal mengikutinya kalau secara kemiliteran dia sudah dipecat, kendatipun berpangkat Letnan Jenderal, namun tanpa jabatan dan kekuasaan lagi?

Situasi yang seperti itu, kelemahan dan ketidak beranian Bung Karno, oleh Soeharto dianggap sebagai peluang yang tidak mungkin bakal datang dua kali Sigap-seperti kucing yang telah siap menunggu, Soeharto segera menerkam, melumpuhkan kekuatan G30S yaitu sebagian militer dari Yon 454/Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya dengan menggunakan pasukan RPKAD Yon 328/Kujang Siliwangi, yang semuanya adalah pasukan yang dipanggil dan berada di bawah pimpinan Pangkostrad Jenderal Soeharto sendiri. Soeharto mengkhianati teman-teman dekatnya, yang begitu percaya kepada dirinya, yaitu Letkol Untung, Kolonel A. Latief dan BrigjenSupardjo.

RRI yang pagi hari digunakan oleh G30S untuk menyiarkan pengumumannya, sore harinya diserahkan kepada Kostrad. Oleh Pangdam V Jaya Letjen Umar Wirahadikusuma, di Jakarta diumumkan dan diberlakukan jam malam dan semua surat kabar media dilarang terbit, kecuali suratkabar militer yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila. Waktu jam malam dan pelarangan terbit media massa itu, digunakan oleh pihak militer melalui RRI dan korannya untuk mengkampanyekan keterlibatan PKI dalam G30S. Semua berita fitnah dan rekayasa yang telah dipersiapkan oleh pihak militer disiarkan oleh Koran Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila.

Lebih jelek lagi, Kolonel (ketika itu, 1965) Haji Sugandhi, Pemimpin Redaksi Harian Angkatan Bersenjata menciptakan suatu sebutan baru, tanpa mengikuti kaedah dan peraturan Bahasa Indonesia, merobah "Gerakan 30 September" menjadi "Gerakan September Tiga Puluh" yang disingkatnya menjadi "Gestapu", dan menjadi populer guna memberikan gambaran kekejaman G30S seolah-olah seperti Gestapo Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Berkat Angkatan Darat, jadilah dan disebutlah G30S sebagai G30S/PKI. Dan semenjak "Gestapu" dilahirkan oleh Haji Sugandhi, maka sebutan G30S/PKI, hanya disebut Gestapu/PKI untuk memberi gambaran dan

penekanan betapa busuk, betapa jelek dan betapa biadab dan menjijikkan PKI itu. Begitulah Angkatan Darat menanamkan dan membangunkan rasa benci yang besar dan melimpah kepada rakyat. Rakyat digiring dan dipaksa untuk mempercayai apa yang mereka kurang mengerti kebenarannya. Inilah suatu kampanye, suatu fitnahan dan hasutan dari para Jenderal Angkatan Darat, Soeharto, Ali Murtopo, Yoga Sugama dan klik serta kelompoknya.

Kendatipun para pentolan dan penggerak G30S seperti Untung, Latief dan Supardjo dll. dapat segera ditangkap dan ditahan, banyak sipil dan militer yang langsung ‘diselesaikan’ dibunuh tanpa melalui peradilan dan hukum. Hari-hari selanjutnya bukan hanya merupakan hari yang kelabu, namun merupakan hari-hari yang gelap gulita dan hitam bagi bangsa dan rakyat Indonesia, karena pembunuhan yang berlaku seperti atas para jenderal itu, sesungguhnya tidak berhenti hanya sampai disitu, namun berlanjut dengan pembantaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan milisia/golongan agama serta massa kanan, dengan restu dan langsung maupun tidak langsung perintah pembersihan dari Jenderal Soeharto, terhadap golongan dan rakyat yang dituduh ”gestapu/pki” dan golongan kiri umumnya. Dengan alasan membasmi dan membersihkan sisa-sisa G30S, dilakukanlah pembunuhan di seluruh pelosok tanah air. Persada tanah air menjadi banjir darah orang-orang yang tak berdosa, besar kecil, tua muda, lelaki maupun perempuan, dibantai tanpa hukum dan pemeriksaan! Manusia Indonesia hidup dalam ketakutan dan saling curiga mencurigai. Pembunuhan terhadap golongan kiri di mana-mana. Sungai-sungai penuh dengan mayat-mayat tak berkepala, jalan-jalan dan rawa-rawa serta jurang dipenuhi tubuh-tubuh tanpa nyawa, kepala-kepala yang dipenggal oleh manusia-manusia yang mengaku bertuhan dan berperikemanusiaan, dipacakkan di simpang-simpang atau tepi jalan menjadi tontonan dan hiburan manusia-manusia haus darah. *Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. (Perang Urat Syaraf/Kompas, 9 Februari 2001).* Dan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh [mahkluk yang bernama] manusia. Sementara itu dalam Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Pemerintah, Letjen Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, dengan bangga mengakui telah membunuh 3 juta orang komunis. Suatu prestasi yang sangat membesarkan hati Imperialis Amerika!

Sedang K.H. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa “orang Islam membantai 500.000 eksPKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh yang tidak termasuk orang Islam” (Mingguan Editor No. 49 Th. VI, 4 September 1993)

Ketangkasan Mayjen Soeharto dalam meredam aksi G30S memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya:”***Sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya***”.

Bahkan Mike Head yang menulis dalam Sydney Morning Herald, 19 July 1999, mengatakan: “***The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI***”.

Benarkah dugaan dan kecurigaan Ratna Sari Dewi dan tulisan Mike Head, wartawan Sydney Morning Herald Australia itu? Lebih daripada itu, benarkah Gestok itu adalah “Gerakan Soeharto 1 Oktober”?

Pembangkangan dan “gerakan” Soeharto melawan atasannya yaitu Presiden RI/Pangti ABRI, dengan menggunakan kliknya dalam Kostrad dan Angkatan Darat (Soeharto-Yoga Sugama dan Ali Murtopo) yang dimulainya pada pagi hari 1 Oktober itu, oleh Bung Karno disebut “Gerakan 1 Oktober” atau disingkat Gestok. Dalam satu kesempatan Bung Karno mengatakan bahwa “Gestok adalah lawannya G30S”.

Namun, Dr. Asvi Warman Adam mengatakan, “***Kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai***

***Gerakan Tiga Puluh September. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan Gestapu dan bukan pula Gestok.***” (*Kompas, Senin, 30 September 2002*). Apa yang dikatakan Dr. Asvi memang benar. G30S adalah Gerakan Tigapuluh September. Akan tetapi, aksi penculikan dan pembunuhan oleh G30S itu dilakukan pada subuh hari 1 Oktober, sehingga ketika Bung Karno menyebut “Gestok” Gerakan Satu Oktober, maka asosiasi rakyat adalah bahwa G30S itu disebut juga sebagai Gestok. Akan tetapi, mungkin bukan itu yang dimaksud oleh Bung Karno, karena beliau mengatakan “Gestok adalah lawannya G30S”. Jadi, ini berarti ada 2 gerakan. Gerakan 30 September dan Gerakan Satu Oktober, yang kedua-duanya sama-sama mulai beraksi pada hari 1 Oktober itu.

Seandainya kita tidak mau menggunakan nama “Gestok” untuk “Gerakan Soeharto 1 Oktober” yang melawan Pangti ABRI, (Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak pernah terdengar sebutan Gestok), maka apakah tidak mungkin bahwa **gerakan Soeharto 1 Oktober itu adalah sebenarnya penerusan atau kelanjutan dari G30S**. Karena kita bisa melihat dan mempelajari bahwa tokoh-tokoh G30S seperti Untung, Latief, dan Supardjo sangat erat hubungannya dengan Soeharto dan digunakannya untuk menghabiskan musuh-musuhnya Soeharto yaitu para jenderal Angkatan Darat. Kemudian, Gerakan Soeharto 1 Oktober itu, sangat erat hubungannya dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo yang adalah klik dan bawahannya Soeharto semenjak tahun 50-an. **Maka, dengan kata lain, baik G30S maupun Gestok adalah sama-sama berada dibawah satu komandan yaitu Pangkostrad, Letjen Soeharto sendiri! Tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa Soeharto ‘berlayar’ diatas dua perahu....!** G30S yang dikepalai Untung, Latief dan Supardjo, umurnya hanya beberapa jam, lalu punah, lenyap tidak bertahan lama. Namun, Gestok yang adalah Gerakan Pembangkangan Soeharto yang bertujuan menjatuhkan Bung Karno dan menguasai Pemerintah Indonesia, berjalan terus. Jalan yang ditempuhnya ialah menghancurkan leburkan PKI sampai keakar-akarnya, yang merupakan pendukung kuat Bung Karno, dengan alasan Soeharto yang mengada-ada yaitu menghancurkan G30S yang kenyataannya sudah tidak ada.

### **Pembunuhan di Daerah-Daerah**

Merasa dirinya menang atas pembangkangan dan perlawanannya terhadap Soekarno yang ternyata tidak mengambil tindakan apa-apa terhadapnya pada pagi hari 1 Oktober 1965 itu, Soeharto memerintahkan Kolonel Jasir Hadibroto yang menghadapnya pada 2 Oktober 65 untuk memburu dan membereskan D.N. Aidit Ketua PKI

Pada malam 1 Oktober itu DN Aidit diculik dari rumahnya dengan alasan “dipanggil Presiden” lalu dibawa ke suatu rumah di Halim dan esoknya diterbangkan ke Solo, Jawa Tengah.

Kolonel Jasir Hadibroto yang menghadap Soeharto di Makostrad ditanyainya oleh Soeharto: “*Di mana kamu ketika pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948?*” “*Saya baru saja dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukan saya diperintahkan untuk menghadapi 3 batalyon komunis di Wonosobo,*” Yasir menjawab. “***Orang yang berontak hari ini adalah keturunan dari PKI Madiun. Pergi, bereskan mereka semua. D. N. Aidit di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana!***” perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto. Di Jawa Tengah, D. N. Aidit, Ketua PKI, ditangkap, dibawa ke markas Batalyon Kostrad di Boyolali dan dibunuh!

Pukul 3.00 sore tanggal 24 November 1965, Kolonel Yasir diterima oleh Soeharto di Istana Yogyakarta. Dia melaporkan segala sesuatu berkenaan dengan penangkapan PKI dan cara membereskan Aidit. Setelah memberikan laporannya, Kolonel Yasir memberanikan diri untuk bertanya: “*Waktu Bapak mengatakan ‘bereskan’ tentang D. N. Aidit, apakah itu yang Bapak maksud?*” Panglima Kostrad, Mayjen. Soeharto hanya tersenyum.

Dengan penculikan yang berlangsung atas DN Aidit dirumahnya pada malam 1 Oktober itu dan dibawa ke Halim lalu esoknya diterbangkan ke Solo, nampak sepertinya dia tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Hanya saja, diceritakan bahwa Aidit diterbangkan ke Solo adalah untuk “menenangkan” para anggota PKI di Jawa Tengah. Untuk apa mereka ditenangkan? Apa yang akan

mereka perbuat? Siapa yang meminta atau memerintahkan supaya Aidit menenangkan anggotanya di Jateng? Tidak ada yang tahu, namun sebuah kata sandi atau pass-word yang diucapkan DN Aidit kepada seorang tokoh PKI di Jateng yang enggan disebut namanya, mengatakan: *“Wah, celaka kita ditipu oleh Soeharto....!”*. Kata-kata ini sangat sederhana tapi menyimpan arti yang sangat besar sekali.

Disamping itu, Soeharto yang telah memulai langkah perlawanannya kepada Bung Karno, memerintahkan jajarannya untuk membasmi PKI sampai keakar-akarnya. Hal ini kemudian diakui oleh Brigjen Kemal Idris, Komandan RPKAD: ***“Soeharto memberi perintah untuk membersihkan semua ...maka ini yang saya lakukan. Saya perintahkan semua prajurit saya untuk patroli dan menagkap setiap orang PKI. Selama masih ada satu orang komunis di Indonesia, akan ada operasi militer melawan satu orang itu”*** (Brigjen Kemal Idris-RPKAD, Shadow Play).

Pembantaian besar-besaran terjadi diseluruh pelosok tanah air. Di setiap kota, desa dan Propinsi mayat-mayat orang yang diduga PKI bergelimpangan.

“Kelompok-kelompok paramiliter pemuda yang dibangun dan dibentuk oleh Angkatan Darat, didorong untuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah orang dan diberi dukungan moral dan logistic dan senjata. Di Jawa Timur, Gerakan Pemuda Ansor yang berafiliasi ke NU merupakan tulang punggung utama Angkatan Darat, sementara di Medan adalah Pemuda Pancasila, dan di Bali adalah gerakan Pemuda Ansor dan kelompok-kelompok pengamanan masyarakat anti-PKI yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia”.

Dari berbagai sumber dan informasi, kita bisa mendapatkan catatan mengenai pembunuhan yang dilakukan Orba/Soeharto di daerah-daerah di Indonesia., sebagai berikut|:

### **Aceh dan Sumatra Utara**

Penduduk Muslim di Aceh sangat gairah dalam menghabiskan kaum komunis. Mereka memotong leher orang-orang PKI dan menancapkan kepalanya di sepanjang jalan buat tontonan. Pimpinan organisasi Pemuda Pancasila mengatakan kepada pejabat Konsulat Amerika di Medan bahwa organisasi mereka (Pemuda Pancasila) akan membunuh setiap anggota PKI yang dapat mereka tangkap. Organisasi itu tidak akan menyerahkan orang PKI itu kepada penguasa/pemerintah, sebelum mereka mati atau hampir mati. Kantor-kantor PKI, toko, dan rumah-rumah dibakar. Ratusan dan mungkin ribuan kader dan aktivis PKI ditahan di penjara atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat tahanan.

*American Free Press* menulis: *“In Aceh, for example, the civilian were decapitated and their heads were placed on stakes along the road. The bodies often repeatedly slashed with knives or sword. Then thrown into the river that they would not 'ontaminate Aceh soil'”*

Sehingga sehari-hari, berminggu-minggu dan bulan, rakyat tidak berani memakan ikan sungai, karena banyaknya mayat-mayat tak berkepala yang mengambang memenuhi sungai-sungai di Aceh dan Sumatra Utara.

Korban buruh perkebunan di Sumatra Utara sedikitnya 100.000 tewas. Sedang di Tapanuli, Utara, Selatan, dan Simalungun, tatanan adat terjungkal setelah milisi Komando Aksi Penumpasan G30S mulai bergerak mengganyang elemen-elemen komunis. Mereka tidak peduli apakah korban adalah paman, satu marga, atau keluarga istrinya. Mereka tidak peduli kendatipun hubungan yang dibentuk hierarki adat itu adalah simpul keutuhan sosial.

### **Riau**

Seorang staf Kedutaan Besar Amerika di Jakarta melaporkan tentang teror militer-muslim yang langsung ditujukan melawan kaum buruh dalam perusahaan minyak vital Caltex: “Muslim dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak militer menjarah rumah-rumah komunis di dalam kota dan menutup gedung-gedungnya di daerah-daerah. Pihak militer menggerebek rumah-rumah pimpinan PKI dan memberitahukan pihak pimpinan perusahaan minyak Caltex pada 29 Oktober 65,

akan rencana militer, yang bakal menangkapi anggota-anggota dan pimpinan buruh komunis Perbum, yang menjadi tulang punggung dan kekuatan PKI di Provinsi Riau.”

Pada tanggal 18 November 1965 (20 hari setelah pemberitahuan pihak militer kepada Manajer Caltex), maka pihak militer, dengan dibantu oleh organisasi-organisasi buruh muslim dan lokal, melakukan operasi penangkapan atas anggota dan pimpinan organisasi buruh minyak Perbum (Persatuan Buruh Minyak), di seluruh daerah perusahaan Caltex. Ratusan buruh, baik staf maupun non staf, ditangkap dan dikumpulkan dalam satu tempat tahanan yang bernama RTM, Rumah Tahanan Militer, di ibukota provinsi, Pekanbaru. Bagi perusahaan minyak asing Caltex, bukan hal yang sulit untuk mengetahui siapa yang menjadi anggota Perbum, karena semenjak 1 Mei 1964, telah ditandatangani suatu Persetujuan Bersama antara kaum buruh dan majikan, yang disebut CLA (*Colective Labour Agreement*), di mana kaum buruh diwajibkan memberi surat pernyataan yang ditandatangani kepada majikan untuk memotong gajinya Rp100/bulan guna diserahkan kepada organisasi yang dipilih oleh buruh. Dengan demikian, seluruh buruh minyak yang menjadi anggota Perbum, yang merupakan 75% dari jumlah semua buruh, terdaftar namanya pada perusahaan minyak Caltex! Dan ketika tiba saat militer yang dibantu organisasi buruh muslim dan lokal (PPC, Persatuan Pegawai Caltex), dengan mudah menangkapi anggota-anggota Perbum yang dituduh sebagai organisasi buruh komunis. Di seluruh pelosok daerah, pihak militer menangkapi orang-orang yang diduga PKI, dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi Pemuda Rakyat, Gerwani, Sobsi, BTI, Lekra, dan sebagainya. Rumah Tahanan Militer menjadi penuh sesak, namun penangkapan terus berlangsung. Dari daerah-daerah kabupaten atau kecamatan, penangkapan berjalan terus, dan para tahanan tersebut, dikatakan, dikirim ke Pekanbaru, ke Rumah Tahanan Militer, namun kenyataannya tidak pernah sampai, hilang lenyap dalam perjalanan, tak tahu kabar beritanya.

Sebagai bukti, dapat dijelaskan, dari Kabupaten Bengkalis, 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju Pekanbaru, namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar beritanya; dari Bagan Siapi-api, 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke Rumah Tahanan Militer Pekanbaru; dari Selatpanjang, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, dan tak seorang pun yang sampai; dari Rengat, 50 orang yang ditangkap dan dibawa dengan truk, dan tak seorang pun yang sampai ke Pekanbaru; dari Tembilahan, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan truk, juga tidak ada yang sampai ke Pekanbaru; di Pasir Pengaraian, 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses. Dari dalam Rumah Tahanan Militer di Pekanbaru sendiri, dalam periode 15 Februari 1966 sampai 16 September 1968, 40 orang tahanan diambil malam dan hilang, dibunuh! Di antara mereka yang diambil dan dibunuh ini banyak yang sebelumnya menjadi pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltex, bahkan seorang ‘staff-employee’ yang sedang dikirim oleh Caltex belajar di Amerika, dipanggil pulang, dijebloskan ke dalam tahanan, kemudian diambil malam dan dibunuh!

Pimpinan Komunis Riau yang mengetahui bahwa mereka dalam incaran organisasi agama untuk diculik dan dibunuh, berusaha menyelamatkan diri dengan berlaku kucing-kucingan dengan pihak militer Angkatan Darat. Namun akhirnya, setelah 3 tahun dapat menyelamatkan diri, pada tahun 1968 mereka ditangkap oleh militer dalam satu operasi yang disebut “Operasi Kalong” dan dimajukan ke pengadilan yang memang telah dipersiapkan dari semula dan dijatuhi hukuman yang telah dijatahkan. \* Abdullah Alihamy, diajukan ke pengadilan rezim Orba di Pekanbaru dan dijatuhi hukuman mati. Dia dipindahkan ke Padang dan dieksekusi oleh regu tembak di Padang. \* Mohammad Amin Zein, diadili oleh Pengadilan Orba di Pekanbaru, dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada tahun 1999 dibebaskan, namun karena ancaman dan intimidasi reziem Orde Baru dan antek-anteknya, maka keluarga dan masyarakat kampungnya, takut untuk menerimanya kembali. Dia, yang adalah bekas Anggota MPRS-RI tersebut. terlunta-lunta di masa tuanya dan meninggal di kota Medan. \* Sri Suharjo, ditahan sementara di Teperda/TPU/RTM Pekanbaru. Setelah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Orba di Pekanbaru, dia dipindahkan ke Padang dan

menjalani hukumannya di RTM Padang. Atas tuntutan Lembaga Amnesti Internasional, dia yang dalam keadaan sangat tua dibebaskan oleh Presiden B.J. Habibie, dan masih sempat bertemu dengan keluarganya beberapa saat sebelum ia meninggal dunia.

## Sumbar

Di Sumatra Barat, negeri yang punya budaya “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” juga tak urung melakukan kekejaman-kekejaman pembunuhan terhadap rakyat yang tidak melakukan kesalahan, kecuali dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI. Keadaannya, sama seperti ketika tahun 1958, di mana PRRI menangkapi semua orang yang dianggap komunis, sehingga tak salah kalau dikatakan bahwa orde baru/Soeharto sebenarnya adalah penerusan PRRI dalam skala global, dari Sabang sampai Merauke. Di setiap kampung dan negeri terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum komunis. Bahkan, kaum alim ulama Minangkabau yang berpikiran maju, dari partai Islam Perti, PSII misalnya, juga dibunuh, kemudian difitnahkan bahwa mereka dibunuh oleh PKI, sehingga menambah kebencian dan kemarahan yang membara dari masyarakat yang menelan bulat-bulat fitnah dan rekayasa pihak militer. Pihak militer orde baru, bersama para milisi dari segala macam organisasi komando aksi, mengharubirukan negeri Minangkabau. Seperti contoh, dapat diceritakan keadaan yang terjadi di satu kampung dan kota, Salido dan Painan di pesisir selatan Sumatra Barat:

Setelah kejadian peristiwa awal Oktober 1965 di Jakarta, dalam menanti dan menunggu pidato dari Presiden Soekarno, yang kiranya dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, rakyat yang dalam ketidaktahuan, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Kodim Painan, Letkol. Purnomo Sipur, yang meneror masyarakat di kota Painan dan sekitarnya. Pasukan Kodim itu dengan kejam dan brutal melakukan penangkapan atas beratus-ratus pemuka masyarakat, rakyat dan ninik mamak di pesisir selatan Kerinci. Beliau-beliau yang ditangkap itu, digiring seperti menggiring hewan ternak, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan digunduli. Sebagian disuntik oleh dokter, yang adalah seorang wamilda (wajib militer darurat) dan dimuat ke sebuah dump truk yang biasa digunakan buat mengangkut sampah, tanah, atau pecahan batu, dan dibawa ke Bukit Pulai, sekitar 10 km di luar kota Painan. Di sana, para pemuka rakyat yang dijubelkan dalam dump truk itu, dituangkan dari dump truk seperti menuangkan sampah. Dan manusia-manusia yang berjatuh di belakang truk yang bak bagian depannya dinaikkan itu, atas perintah dan komando Letkol. Purnomo Sipur, diberondong dengan tembakan senjata api. Jerit, pekik dan lolong manusia-manusia tak berdosa, menyebut nama Allah, menggema di Bukit Pulai pada tanggal 9 November 1965 itu. Tubuh-tubuh korban yang secara paksa dihabisi nyawanya itu, bergelimpangan bermandi darah, diiringi dengan sorak-sorai dan tawa ria serdadu-serdadu brutal dan biadab pengikut Jenderal Soeharto, di bawah komando Letkol. Purnomo Sipur. Tidak terhitung jumlahnya anak-anak bangsa, yang di antaranya adalah pejuang Perintis Kemerdekaan RI, ninik mamak dan alim ulama Minangkabau, direnggut secara paksa hak hidupnya oleh rezim biadab orde baru/Soeharto. Syamsudin, seorang bekas anggota Mobrig (Mobile Brigade—TNI), ditangkap oleh militer rezim Soeharto. Tangan dan kakinya diikat pada dua buah pedati yang kemudian ditarik oleh dua ekor kerbau dengan arah yang berlawanan. Tubuh Syamsudin hancur berkecai. Potongan tubuh bertebaran dengan darah yang berserakan membasah bumi Minangkabau! “Pesta” militer yang brutal dan biadab ini mereka lakukan di depan anak dan istri Syamsudin, yang dipaksa untuk menyaksikan “kebudayaan” AD/orde baru Jenderal Soeharto!

Nurhayani, seorang gadis remaja yang baru saja tamat SMP, ditangkap, karena dia menghalang-halangi Letkol. Purnomo Sipur yang akan menangkap ayah si gadis. Perwira ABRI/Jenderal Soeharto yang gagah perkasa ini, memasukkan Nurhayani ke dalam karung dan mengikatnya, dan melemparkannya ke Batang (Sungai) Nilam di Air Hadji. Para militer yang hebat dan perkasa itu, tertawa terbahak-bahak, sambil minum air kelapa muda, melihat karung yang berisi tubuh Nurhayani menggelepar-gelapar dibawa arus air. Setelah pahlawan-pahlawan rezim Soeharto itu berlalu, keluarga dan sanak saudara Nurhayani, dengan raung dan tangis, mengambil mayatnya dari Sungai Nilam dan mengebumikannya sesuai dengan adat istiadat Minangkabau.”

Bagaimana dengan daerah, kota dan kabupaten-kabupaten lain seperti Agam, Limapuluhkoto, Pasaman, Kerinci, Pesisir Selatan. Dan Padang Pariaman, dll.? Di Sumatra Barat, banyak ninik mamak, para tetua dan kaum agama serta para ustadz yang dibantai oleh militer dan milisia karena dianggap bersimpati kepada PKI disebabkan kaum agama itu umumnya adalah anggota Partai Islam Perti yang dipimpin oleh KH Sirajuddin Abbas, yang bukan saya bersimpati kepada PKI namun juga menjadi anggota “Dewan Revolusi” nya G30S Letkol Untung Samsuri nomor urutan 12 dan Haji Fatah Yasin anggota “Dewan Revolusi” nomor urutan 13. Sekarang, setelah para saksi banyak yang mati karena tua dan sakit, organisasi kaum agama merekayasa, memlintir dan memutar balik sejarah dengan mengatakan bahwa semua kaum agama itu dibantai oleh G30S/PKI, dan bukannya PKI atau yang di PKI-kan yang dibantai. Sayangnya, plintiran ini diikuti oleh sebagian kaum muda yang baru lahir setelah Peristiwa dan tidak tahu apa-apa. Buat ninik mamak, cerdik pandai dan kaum agama yang tidak sempat dibantai oleh milisia dan militer ditahun 65/66 itu, ditangkap dan ditahan dalam kamp-kamp tahanan disetiap kota dan kabupaten sebagai tapol bertahun-tahun lamanya, dan banyak yang mati karena sakit dan lapar selama ditahan.

### **Jawa Barat**

Di Jawa Barat, pembunuhan massal juga terjadi, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil karena militer di Jawa Barat cukup patuh pada perintah Presiden Soekarno untuk tidak saling membunuh. Tapi basis-basis PKI di Subang, Indramayu, dan Cirebon tetap diluluhlantakkan, dibumi-hanguskan, dan dihancurkan. Puluhan ribu orang mati dibunuh hanya dalam tempo dua bulanan.

Kenapa pembunuhan di Jabar tidak “sehebat” di Jateng atau Bali misalnya? Dalam hal ini, Prof. Ben Anderson sempat berwawancara dengan Pangdam Siliwangi, Jenderal Ibrahim Ajie, dan bertanya: “Kenapa tidak ada pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat?” Jenderal Ajie menjawab: “Sebenarnya memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Itu sebabnya karena saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini sebagian besar orang biasa, orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macam-macam.” Ternyata kewibawaan si Adjie yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh, namun pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Soeharto, lalu dibuang ke London jadi dubes di sana. Namun, jangan dikira bahwa memang “tidak ada” pembantaian massal di Jabar pada waktu itu. Ini merupakan suatu kemustahilan. Hanya saja, kemungkinan sekali apa yang terjadi, tidak diberitakan atau tidak terungkap. Rakyat Jawa Barat tentu lebih mengetahui jelas bagaimana keadaan sebenarnya.

Pasukan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo, setelah mengharubirukan Jakarta, setelah membunuh dan menangkap orang-orang kiri terutama komunis, mulai bergerak masuk Jawa Tengah pada bulan Oktober itu, lalu menyebar ke Jawa Timur di bulan November dan kemudian menyebar ke Bali untuk melakukan pembunuhan di bulan Desember 1965. (Catetan: Ini informasi lama, jadi mungkin juga kurang lengkap-pen)

### **Jawa Tengah**

Menurut yang diceritakan dalam film dokumen *Shadow Play*, pasukan Sarwo Edhi Wibowo, setelah Jakarta, lalu pertama-tama ke Jawa Tengah, membersihkan, menghilangkan para perwira dalam Divisi Diponegoro yang bersimpati kepada G30S.

Prof. Ben Anderson dalam satu wawancara mengatakan, bahwa kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G30S, Kolonel Suherman - asisten satu, Kolonel Maryono - asisten tiga, Letkol. Usman - asisten empat, dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah, kemudian mereka juga hilang. Tidak pernah di antara mereka ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas, dan itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari *Buku Putih* apa yang terjadi di Jawa Tengah sama sekali tidak menjadi

masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. Dan, siapa yang tahu tentang mereka yang hilang ini? Kita harus tanyakan kepada pemerintah Indonesia, Suherman di mana? Maryono, Usman di mana? Dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G30S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, *ya tentara sendiri*.

Di Boyolali, 21 Oktober 1965, menjadi awal pembantaian massal, ribuan orang ditembaki dan digorok secara biadab. Kuburan massal hasil galian paksa para korban tercipta mendadak. Orang-orang yang menolak membunuh atau menggali kuburan, diancam akan ikut dibunuh. Tubuh-tubuh tanpa kepala bergelimpangan di desa dan kampung perkotaan sekitar Solo, Blora, dan Prambanan. Di Blora sendiri tak kurang 5.000 orang dibantai dengan sadis. Sungai Bengawan Solo, Kali Wedi Klaten, dan Sungai Brantas di Jawa Timur penuh dengan mayat bertubuh tak utuh. Kali jadi merah. Orang ketakutan. Tak jelas siapa kawan, siapa lawan.

### **Jawa Timur**

Laporan dari misionaris Katolik di Kediri menyebut 3 ribu orang tewas dibantai pada November 1965. Jenderal Soemitro, Pangdam Brawijaya mengatakan bahwa *1 orang nyawa jenderal harus ditebus 100 ribu nyawa PKI*. Beginilah cara para perwira militer menghasut rakyat sipil. Ia sendiripun mengiringi pembantaian massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dia pulalah yang memimpin penangkapan, penggorokan, penembakan ratusan massa sekaligus dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang digali oleh para korban itu sendiri. Diperkirakan 250.000 korban mati atau hilang di Jawa Timur.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. *“Awat kalaukau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan sajadi bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati”*.

### **Bali**

Di Bali, pembantaian massal dimulai setelah RPKAD mendarat pada awal Desember 1965.

Mereka menggalang milisi-milisi binaan PNI yang disebut Tameng. Mereka juga datang bersama segerombolan milisi Jawa - Madura yang berasal dari Banyuwangi. Pola pembantaian pun kurang lebih sama biadab dengan di Jawa, bahkan mungkin lebih menggila karena ketegangan antara PNI dengan PKI merasuk sampai ke ranah-ranah pribadi di dalam keluarga-keluarga besar. Dengan memanfaatkan adat dan ritual, di beberapa tempat terjadi pembantaian seluruh garis keluarga dengan anggapan akan menghilangkan dendam turunan. Laki-laki berusia 17 tahun ke atas, apalagi kalau ia pandai, tak bakal selamat. Bali harus dibersihkan dari malapetaka, diupacarai dengan banjir darah agar Pulau Dewata suci kembali. Mayat-mayat pun dipotong, dipisahkan tangan, kaki dan kepala dari badan dan dibuang di berbagai tempat supaya unsur-unsur jahat tak bersatu. Rumah demi rumah di suatu desa dibakar, kadang-kadang dengan penghuninya secara hidup-hidup. Kuburan massal yang berisi ratusan mayat bertebaran hampir di seluruh bagian pulau cantik ini. Terkirakan sekitar 80.000—100.000 jadi korban pembantaian.

Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan. Pembunuhan di Bali ini diperkirakan 5% dari jumlah penduduk Bali sendiri.

Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Australian National University Melbourne, mengatakan: *“Kadang-kadang tentara sendiri masuk ke desa membunuh orang, tapi biasanya orang ditangkap, ditahan, dan dikeluarkan di tangan milisia, di tangan organisasi-organisasi yang diadakan oleh tentara untuk dibunuh. Sarwo Edhi yang memimpin RPKAD mengatakan bahwa di Jawa rakyat*



*harus dihasut untuk membunuh orang komunis. Dari saksi, jelas, bahwa di Bali juga RPKAD punya peranan besar menghasut rakyat”.*

*“Ditangkap di satu desa dan dibawa ke desa lain dan dibunuh, supaya orang yang ditangkap tidak kenal dengan si pelaku. Untuk ini perlu kordinasi. Nah, saya ingin tahu siapa kordinator ini?”* tanya Prof. Dr. Henk Schulte Merdbolt, sejarawan Amsterdam University, Netherland.

Dalam penyelidikan rakyat Bali sendiri, diketahui beberapa tempat yang menjadi lokasi kuburan massal di Pulau Bali, seperti: di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, di Desa Rendang dan Nongan Kabupaten Karangasem, di Pantai Masceti Kabupaten Gianyar, di Desa Kapal Kabupaten Badung. Umumnya mereka yang dibantai di Desa Kapal, adalah orang-orang yang ditahan, diambil, dan dikeluarkan dari kamar tahanan dan dibunuh. Di antara mereka adalah Ketut Kandel, Anom Dede, Ir. Sataya Bandem Wirka, Bandem Pageh, I Gede Puger, Anak Agung Kencana, Wayan Duma, Anak Agung Tiaga, Ida Bagus Dupem, Ida Bagus Warjana, Ketut Nadi, Harto Setiadi. Di antara mereka, ada yang ditembak, belum mati lantas dibuang ke lubang dan ditimbun, bahkan ada yang tubuhnya dicincang dan dipotong-potong, leher, kaki dan tangan diceraiberaikan seperti yang mereka lakukan atas I Gede Puger, tokoh veteran pejuang Bali. Pulau Bali benar-benar bersimbah darah! Hanya dalam beberapa minggu di bulan Desember 1965, antara 80 - 100 ribu orang mati dalam pembantaian, merupakan 5% dari jumlah penduduk Pulau Bali.

Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa bulan dari mulai Oktober 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan umum ada sekitar 800 ribu sampai sejuta orang dibunuh dengan berbagai cara. Digorok, disiksa, dipenggali dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban, dibantai dan ditembak secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan. Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya macam KAMI, KAPI, KAPPI, dst. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki atau tidak, direbut kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal, kantor Golkar atau markas milisi orba, sampai sekarang. Puluhan ribu orang dibuang dan dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusakambangan, memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan kebutuhan para perampok kehidupan mereka.

Hampir di setiap kota provinsi dan kabupaten didirikan tempat-tempat tahanan orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan “ada indikasi atau terlibat langsung maupun tak langsung dengan G30S/PKI”. Ratusan ribu tahanan ditempatkan di dalam kamp-kamp yang sangat tidak memadai dan di bawah standar kemanusiaan. Tempat, kesehatan, makanan, dan lain-lain yang sangat minim yang semuanya itu hanya bertujuan untuk melenyapkan secara pelan dan bertahap, mengikut apa yang diucapkan Soeharto: *Kalau ditahan terus, siapa yang memberi makan?* Karena kenyataannya, di samping para tahanan yang mati karena sakit, kurang makan dan tekanan batin, dsb., banyak di antaranya yang diambil malam hari dari tempat tahananannya dan dibunuh. Inilah praktik kekejaman kemanusiaan, kebiadaban, yang dilakukan oleh rezim orba/Soeharto.

### **Jumlah Korban**

Team pencari fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000 - 100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.

Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa.

John Hughes dalam bukunya *Indonesian Upheaval* (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang.

Donald Hindley, dalam tulisannya, *Political Power and the October Coup in Indonesia* (1967),

memperkirakan sekira setengah juta orang.

Prof. Guy Pauker, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Seskoad (Sekolah Staf komando Angkatan Darat), dalam tulisannya *Toward New Order in Indonesia* memperkirakan 200.000 orang yang dibunuh. (Sebagai tokoh CIA, tentu sedapat mungkin dia memperkecil jumlah korban-pen)

Yahya Muhaimin dalam bukunya *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 - 1966*, memprediksikan sekira 100.000 orang.

Ulf Sundhaussen, dalam bukunya *The Road to Power: Indonesian Military Politic 1945 - 1967* (1982), khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.

Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada Panitia Pencari Fakta, mengaku telah membunuh 3 juta komunis. Sedang K.H. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa "*Orang Islam membantai 500.000 eks-PKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh yang tidak termasuk orang Islam*" (*Mingguan Editor No. 49 Th. VI, 4 September 1993*).

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia, yang direkam dalam film dokumen *Shadow Play* mengatakan: *Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Soedomo [Kopkamtib] mengatakan 2 juta yang dibunuh, Sarwo Edhie [RPKAD] mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang.*

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, ketika masih menjadi senator, dalam satu tulisannya mengatakan: *In 1965, under the leadership of GeneralSoeharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.*

Sedang Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. (*Perang Urat Syaraf/Kompas*, 9 Februari 2001). *Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. (In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.)*

**And, last but not least, "Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, yang lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh menteri dalam negeri saat itu, Mayjen. Dr. Soemarno, dengan anggota-anggota: Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat, S.H., Mayjen. Achmadi (eks. Brigade.XVII/TP), dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima RPKAD, kepada Permadi, S.H., jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3.000.000 orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri," kata sumber itu.**

Dengan begitu banyaknya jumlah manusia Indonesia yang dibantai oleh Angkatan Darat atas arahan, perintah ataupun persetujuan Soeharto waktu itu, apakah kita mesti lupakan begitu saja? Berapa puluh juta sanak saudara, 'udek-udek gantung siwur dan canggah wareng' dari korban yang dibantai AD itu? Mestikah kita lupakan mereka itu begitu saja dan menganggap bahwa membicarakan nasib mereka sebagai "*tidak produktif*"? Akankah kita kubur sejarah hitam itu ke lautan dalam, sehingga generasi bangsa selanjutnya mudah ditipu dan diperbodoh dengan sejarah rekayasa dan tipuan licik?

Hersri Setiawan, seorang mantan tapol Pulau Buru dalam satu tulisannya mengatakan: "*...rezim Orba memutlakan versi sejarahnya tentang Peristiwa 65, dengan cara menggelapkan dan*

*membelokkan fakta. Generasi pasca-65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya!*” Itu sebabnya, tidak heran banyak diantara generasi muda kendatipun sudah menjadi sarjana sejarah Indonesia namun pikirannya sudah tercuci dan terkontaminasi dan tetap mengikut serta menganut sejarah rekayasa Soeharto dan kliknya yang dimutlakkan, sehingga tanpa mendalami lebih jauh, menjadi sesumbar dan berteriak:

“.... Pembunuhan, penyiksaan, dan pembuangan di Pulau Buru dan Plantungan akibat kekeliruan keputusan politik pimpinan PKI yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban”. Kami sudah kenyang dengan penderitaan akibat partai bapak saya yang tidak bertanggungjawab.” Tidak heran, orang yang berwatak demikian bisa gampang mendapat title sarjana dalam “arena pendidikan orba” sebab kalau Orba mengetahui, menurut Peraturan Mendagri Amir Mahmud No. 32/1981, jangan harap anak-anak PKI yang masih membela “partai bapaknya” akan bisa menjadi sarjana. Satu satunya jalan untuk tidak mungkin diketahui, adalah mengutuk PKI, mengutuk partai bapaknya, bahkan tidak mengakui bapaknya! Dengan kata lain, membebek dan menerima bulat-bulat apa yang dijejalkan orba/Soeharto bahwa PKI itu salah, keliru dan menjadi pemberontak dan harus dimusnahkan. Meminjam kata-kata Hersri Setiawan: “*Generasi pasca-65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya!*”. Tigapuluh dua tahun Soeharto ditampuk kekuasaan, bukanlah sebentar. Semuanya bisa diroboh dalam masa yang begitu lama! Bayi yang lahir putih bersih, selama 32 tahun bisa menjadi najis dan kotor dengan segala ajaran, didikan dan indoktrinasi yang salah!

Prof. John Roosa, dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal menulis: “*Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G-30-S*” (John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, halaman 95, alinea 2). “*Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G-30-S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian*” (John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, halaman 99, alinea 2). Ini berarti bahwa yang dikatakan “bukti” itu hanyalah “tuduhan” Angkatan Darat....! Apakah ‘tuduhan’ Angkatan Darat itu sudah pasti benar?

Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur pernah mengatakan: “*Kalau bangsa ini ingin berhasil di masa depan, harus jujur dengan masa lampau*”.

Pertanyaan kita adalah: Apakah pemimpin-pemimpin Indonesia yang duduk di pemerintahan sekarang ini jujur dengan masa lampau? Harus kita ingat, Peristiwa Pelanggaran HAM Terbesar 1965 tidak pernah bakal dilupakan. Sejarah 1965 tak mungkin dihapuskan! Apakah bisa dikatakan jujur kalau ada Jenderal yang mengatakan tidak ada genosida di Indonesia? Apakah bisa dikatakan jujur kalau mengatakan bahwa tidak ada Jenderal yang bunuh rakyatnya? Apakah bisa dikatakan jujur dan berperikemanusiaan kalau mengatakan “itu kan sudah lama, perlu apa dibicarakan?” Bahkan ada juga yang mengeluarkan ucapan singkat yang masa bodoh, yaitu “*sing uwis yo uwis*”, sepertinya kebutuhan manusia itu cuma makan dan berak. Kenapa mereka semua berkata begitu? Apakah karena mereka ikut ambil bagian dalam pembantaian masa itu? Apakah rakyat hanya akan meng-amini dan mengikuti suara-suara para tokoh atasan yang tangannya ikut berlumuran darah 52 tahun yang lalu itu?

**Sesungguhnya, siapa sajakun yang menjadi Presiden RI, selama kasus tragedi 1965 tidak diselesaikan tuntas secara hukum, selama itu akan menghantui Pemerintahan Indonesia! “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”, pesan Bung Karno Presiden Pertama Indonesia.**

Para pembaca yang budiman, untuk mendapatkan data yang lebih jelas, silahkan lah Anda mendapatkan dan membaca buku/tulisan dan riset dari tokoh-tokoh sejarah seperti Dr. Asvi, Prof. Anderson, Drs. Harsutejo, Prof. Wertheim, Prof. John Roosa dan banyak lainnya lagi. Juga semua tulisan dan risalah yang telah diterbitkan dan dikirimkan melalui internet oleh ExLibris1965, disamping juga membaca buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia (MASHI) terbitan Ultimus Bandung, 2010, dengan kata pengantar dari Prof. Jakob Sumardjo, Bandung. Dari buku ini, yang juga telah disebarakan melalui e-mail oleh ExLibris, pembaca, di samping bisa melihat dan mengulang serta mengingat kembali Peristiwa 1965 yang mengerikan dan menelan jutaan korban,

Anda juga akan menemukan lebih kurang 1500 nama-nama korban pembunuhan yang dilakukan oleh aparat orba di kota-kota di propinsi Jateng, Jatim, Bali, Sumbar, Riau, dll. periode 1965/1966, termasuk sebagian nama-nama mereka yang diambil malam hari dari Kamp Tahanan diberbagai daerah, yang tercantum sebagai lampiran buku tersebut, karena mana tahu ada kenalan atau teman Anda yang hilang semasa menjadi tapol orba, namanya mungkin tercantum dalam buku itu.

Para pembaca yang budiman, kita telah melihat banyak sedikitnya tentang korban pembunuhan massal 1965 dan tentang “hubungan” Jenderal Soeharto dengan G30S. Bagaimana pula dengan hubungan personil para tokoh-tokoh G30S itu sendiri dengan Soeharto, bagaimana kedekatannya dan dimana dan bagaimana kedudukan Soeharto diantara mereka satu sama lain? Marilah kita telusuri sedikit riwayat para pentolan G30S itu.

### **Letkol. Untung Samsuri**

Saat itu adalah Komandan Yon I Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, adalah lulusan Akmil yang terbaik, bersama Benny Murdani bertugas dalam perebutan Irian Barat dan merupakan salah satu anak buah Soeharto yang dipercaya. Kendatipun tidak sekelas dengan Soeharto, Untung juga tergabung dalam “Kelompok Pathuk” dan bertemu kembali dengan Soeharto tahun 1962. Untung menikah tahun 1964 dengan gadis hasil carian Ibu Tien Soeharto, di mana pernikahannya dihadiri oleh Soeharto dan istrinya di Kebumen. Dengan demikian, Untung adalah merupakan anak mantu angkat Soeharto. Letkol. Untung pernah dikirim belajar ke AS. Menurut catatan CIA tertanggal 1 Oktober 1965 dalam “CIA, 2001:300, memorandum untuk Presiden Johnson” bahwa Untung memiliki “*military police background and was trained in the United States.*”

Sebelum pelaksanaan G30S, Untung menemui Soeharto dan menyampaikan rencananya untuk menangkap dan membawa para jenderal yang diduga akan melakukan kup terhadap Bung Karno. Dengan antusias, Soeharto menjawab: “Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu. Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah”

Untuk merealisasinya, Soeharto memanggil Batalyon dari Jateng dan Timur dengan telegram No. T.220/9 (15 September 1965) dan mengulanginya dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika Batalyon itu sampai di Jakarta, diterima dan diinspeksi oleh Soeharto selaku Pangkostrad. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya. (Kita dapat lihat betapa dekatnya hubungan Soeharto dengan Untung dan betapa gairah dan antusias Soeharto akan segala rencana Letkol Untung Samsuri-pen).

Pada 1 Oktober 1965, Untung tampil sebagai pemimpin Gerakan 30 September yang menculik para jenderal AD, yang ternyata kemudian dibunuh. Pembunuhan para jenderal ini, dianggap menyimpang dari rencana mereka semula, yang hanya akan menangkap dan menghadapkan para jenderal kepada Presiden. Setelah G30S meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya sebelum kemudian ia tertangkap, dan ditahan. Setelah melalui sidang kilat Mahkamah Militer Luarbiasa (mahmilub). Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1969.

### **Kolonel A. Latief**

Menurut riset dan tulisan Harsutejo dalam “Sekitar G30S”, pada awal tahun-tahun kemerdekaan, A. Latief, yang pada waktu itu berpangkat Kapten, pernah menjadi Komandan Kompi dari Kesatuan dibawah pimpinan Letkol. Soeharto di Yogyakarta. Dalam Serangan Umum 1 Maret di Yoga, Pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yoga dari Godean.

Belakangan, Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan yang strategis. Sebagai Komandan Kostrad pun Soeharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan mendatangi rumahnya ketika Latief mengkhitankan anaknya. Latief sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Soeharto. **Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Soeharto bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat.** Soeharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Soeharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Soeharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur, akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.

Di luar dinas Latief mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup akrab dengan Soeharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Soeharto dikhitkan, isteri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan anaknya maka Soeharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Soeharto di Jl HA Salim, ia membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jl Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Soeharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.

**3 minggu sebelum meletusnya G30S, Letkol. Untung dan Kol. Latief masing-masing sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, sudah merundingkan dengan Soeharto langkah-langkah yang perlu diambil, sebab Untung dan Latief kedua-duanya bekas anak buah Soeharto, dan persahabatan mereka terus berkelanjutan ([http://www.geocities.com/arsip\\_nasional/politik/politik12.htm](http://www.geocities.com/arsip_nasional/politik/politik12.htm))**

*“Seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari) saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto MENGHENDAKI (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden SOEKARNO DIGANTI, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: 'Tidak mungkin, karena BUNG KARNANO didukung rakyat!'; (Catatan: Sayang sekali Kolonel Latief tidak menaruh perhatian akan ucapan yang merupakan iktikad Soeharto yang “menghendaki” Presiden Soekarno diganti ini, sehingga Latief sebagai prajurit, sebagai bawahan, tetap melanjutkan gerakan yang sudah mereka rencanakan.- Pen.)*

*“Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 09.00 - 10.00 (siang hari) saya menemui Jenderal Soeharto yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto” menurut pengakuan A. Latief.*

**Pada tanggal 30 September, jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief atas persetujuan Untung dan Supardjo, mengunjungi Jenderal Soeharto di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi terakhir “gerakan” yang bakal dimulai empat jam lagi.**

Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978. Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982. Latief merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Soeharto.

Seperti yang tercantum dalam pembelaannya di depan Mahmilub pada 27 Juni 1978. Letkol Latief tetap menuduh Jenderal Soeharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Namun, sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang, tidak menjelaskan secara terperinci, sampai berapa jauh keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S. (Kita lihat diatas, betapa eratnya hubungan antara Latief dan Soeharto, **bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat**).

## **Brigjen Supardjo**

Ia berasal dari Divisi Siliwangi, pasukan Supardjo-lah yang telah berhasil menangkap gembong DI, Kartosuwiryo, dan mengakhiri pemberontakan DI di Jawa Barat. Kemudian ia ditugaskan ke Kostrad, lalu menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah Jenderal Soeharto. Tokoh ini juga cukup dekat dengan Soeharto. Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh ini pun, seperti kedua tokoh sebelumnya, yakni Letkol. Untung dan Kolonel Latief, seseorang yang memiliki kesetiaan tinggi kepada Presiden Soekarno.

**Supardjo merupakan anggota kelompok yang biasa disebut kelompok Kolonel Suwarto (Seskoad Bandung), yang di dalamnya terdapat Alamsyah, Amir Makhmud, Basuki Rakhmad, Andi Yusuf, Yan Walandow.**

Ia mempunyai hubungan lama dengan CIA dan menjadi petugas Soeharto dalam mencari dana dari luar negeri. Ia pun anggota trio Soeharto – Syam - Latief, cs. [Untung, Supardjo], begitu tulis A.M. Hanafi. **Brigjen. Supardjo pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika yakni di Fort Bragg dan Okinawa.** Tentulah pemilihannya selain berdasar kriteria di dalam negeri yakni pihak AD, juga telah melalui seleksi ketat baku yang dikendalikan oleh CIA. Sampai di mana tangan dinas rahasia CIA bermain dalam hubungan ini?

Setelah kegagalan G30S, ketika ditahan di RTM Budi Utomo, Jakarta, dalam keadaan diisolasi Supardjo mendapat simpati banyak orang, dari petugas maupun tahanan lain.

**Di depan mahmilub, jenderal ini telah menantang agar bukan cuma G30S yang diadili, tetapi juga Dewan Jenderal (DJ). Untuk itu ia siap membuktikan keberadaan DJ, kegiatan mereka masa prolog yang menjurus pada Peristiwa G30S dan masa yang sama serta bahan-bahan setelah kejadian. Tentu saja permintaan semacam itu hanya menjadi suara di padang pasir tanpa gaung dalam situasi pengadilan penuh rekayasa serta tekanan politik dan penindasan fisik massif rezim orba. Sedang permintaan sederhana yang amat wajar dari Sudisman di mahmilub untuk menghadirkan Supardjo sebagai saksi tidak dipenuhi.**

Salah seorang putra Jenderal Supardjo mengisahkan detik-detik terakhir sebelum dia dieksekusi pada 16 Mei 1970. Ketika bertemu keluarganya, dia meminta mereka menggenggam dan menghancurkan sebuah apel, lalu dia memberikan ke masing-masing anaknya apel yang telah digigitnya untuk dihancurkan. “Kalau kalian terdiri dari kepingan-kepingan kecil, akan gampang dihancurkan. Tapi jika kamu bersatu, mungkin akan hancur, tapi diperlukan kekuatan besar...”. Pada saat terakhir, “Saya lihat ayah berjalan menuju tempat eksekusi. Dia mengenakan baju olahraga putih yang menurut dia bisa sekaligus untuk kafan. Ayah tenang berjalan menuju lapangan sambil menyanyikan lagu *Indonesia Raya*.” Demikian yang ditulis *Tempo*, 9 Oktober 2005.

## **Syam Kamaruzzaman**

Bahan atau data-data tentang tokoh sipil yang menjadi “gembong“ G30S yaitu Syam Kamaruzzaman, sangat banyak dan bisa kita peroleh dari tulisan-tulisan para ahli riset dan sejarah seperti Ben Anderson, Dr. Asvi Warman Adam, Harsutedjo, dan Prof. John Roosa serta para ahli lainnya. Namun, untuk sekedar pengetahuan kita bersama, marilah sedikit kita kutip tulisan Harsutedjo tentang Syam ini.

“Nama asli Syam ialah Syamsul Qomar bin Mubaidah, dalam dokumen 1960-an disebut Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Sjamsuddin, Djiman, Karman, Ali Muchtar, Ali Sastra. Ia diduga membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya.

Menurut Letkol. Ali Said, S.H (Oditur Mahmilub waktu itu), Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan D.N. Aidit. Ia sebagai jenderal intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak

1949.

**Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro** dengan pangkat letnan satu, eks Laskar Gabungan Yogya yang sebelumnya **berada dalam satu Kelompok Pathuk bersama Letkol. Soeharto**. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryosudirjo. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latief, ia berada dalam pasukan Soeharto ketika SU 1 Maret 1949. Sekitar 1947, Syam mulai berkenalan dengan D.N. Aidit yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalyon 10 Yogya, Lettu. Syam di bawah Letkol. Soeharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Hubungan persahabatannya dengan Soeharto berjalan selama 20 tahun. (Ada informasi yang mengatakan bahwa pada waktu itu Aidit juga merupakan anggota pemuda Kelompok Pathuk bersama Syam dan Soeharto-pen).

Pada tahun 1949, Syam pindah ke Jakarta dan pada 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam [menurut mitos] yang ditahan di Tanjungpriok karena tidak punya tiket.

Pada tahun 1950—57, ia di SOBSI Jakarta, sebagai sekretaris. Pada 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, Ketua PKI.

Peter Dale Scott menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Yogya. **Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI), pada 1958, Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA**. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung atau pun tidak.

Ketika Kolonel Soeharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Poulgrain. Hubungan mereka begitu menjelimet, terbungkus dengan segala kerahasiaan. Kolonel Suwanto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Berkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwanto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwartolah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut *civic mission* AD, yang sebenarnya merupakan *civic action* CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA.

Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda, dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI, nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkasbitung, Banten. Dalam arsip Belanda, Syam tercatat sebagai intel Recomba Jawa Barat. Recomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran 1950-an, ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota (KMK) Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain.

PADA 1960-an dengan bentuk lebih jelas pada 1964, Syam diangkat menjadi ketua Biro Khusus (BC), suatu jaringan intelijen PKI yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku ketua Politbiro CC PKI. Tugas Syam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya. Tugas Syam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tak mungkin dilakukan alat-alat formal PKI. BC mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikannya kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit, bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan.

**Menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan agen CIA, Soeharto mendapat perhatian cukup dari BC PKI dan dibina melalui Syam, Untung, dan Latief**. Dalam hal ini Soeharto mendapat kategori sebagai ‘orang yang dapat dimanfaatkan’. Hal ini cocok dengan keterangan

Untung dan Latief bahwa Soeharto akan membantu gerakan mereka, dan dibuktikan dengan didatangkannya Yon 530 dan Yon 454 dalam keadaan siap tempur. Sedang yang lain menamainya sebagai trio sel PKI.

Pada tahun 1967, majalah *Ragi Buana* menamai Syam sebagai 'double agent', ia menjadi informan Kodam Jaya sejak 1955 sampai kudeta 1965. Untuk memperdalam ilmunya pada 1962 ia dikirim ke RRT, Korea Utara, dan Vietnam, termasuk memperdalam bidang intelijen terutama menyangkut strategi mempersiapkan dan menggerakkan pemberontakan bersenjata. Menurut Dr. Asvi Warman Adam (*Kompas*, Senin, 30 September 2002), "**Syam sendiri masih misterius, apakah dia double agent (AD dan Biro Khusus PKI) bahkan triple agent (AD, Biro Khusus PKI, dan CIA)?**"

**Sebagai Ketua BC PKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personilnya, maka BC ini merupakan partai dalam partai dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CC PKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam. Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI. Nama Syam juga berada dalam daftar gaji Kodam Jaya. Di Kodam Jaya, Syam berhubungan dengan Latief, di samping hubungannya dengan Kostrad.**

Setelah G30S gagal, semua pimpinannya, Untung, Latief, Supardjo dll. ditangkap. Syam ditangkap pada 8 Maret 1967 di Cimahi dan ditahan di RTM Budi Utomo Jakarta pada 27 Mei 1967. Namun, berbeda dengan tahanan lainnya, Syam mendapat perlakuan "super istimewa" selama dalam tahanan. Oei Tjoe Tat, S.H., mantan menteri negara yang juga pernah ditahan di RTM, menggambarkan Syam sebagai orang yang tidak tahu diri. Kalau ia keluar untuk diperiksa, orang lain menjadi tidak tenteram karena ulahnya. Ia orang misterius yang dijauhi oleh para tahanan yang lain. Dengan telah ditembakmatinya Aidit tanpa diajukan ke pengadilan maka Syam mempunyai kesempatan untuk memonopoli seluruh keterangan tentang G30S dalam hubungannya dengan PKI. Hanya Syam sebagai Ketua BC PKI dan Aidit sebagai Ketua Politbiro PKI yang mengetahui seluk beluk biro tersebut dalam hubungan dengan peristiwa G30S serta hubungannya dengan sejumlah perwira militer.

Syam dijatuhi hukuman mati oleh mahmilub pada 9 Maret 1968. Namun, berdasarkan catatan, Syam diambil dari Cipinang pada 27 September 1986 jam 21.00 oleh petugas Litkrim Pomdam Jaya atas nama Edy B. Sutomo (NRP.27410), lalu dibawa ke RTM Cimanggis. Tiga hari kemudian tengah malam bersama dua kawannya ia dibawa dari Cimanggis dan pada jam 01.00 sampai ke Tanjungpriok. Mereka diangkut dengan kapal laut militer ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada jam 03.00. Tak ada keterangan mengapa pelaksanaan eksekusi terhadap Syam - dan sejumlah tokoh yang lain - terus diulur-ulur hingga 14 tahun dihitung dari sejak masuk Cipinang, bahkan 18 tahun bila dihitung sejak vonis mahmilub".

**Jalannya peristiwa menunjukkan peran agen Syam menjadi salah satu kunci penting keberhasilan operasi yang sedang dilancarkan oleh sahabat lamanya, Jenderal Soeharto. Mungkinkah orang yang agaknya tahu betul akan "isi perut" Soeharto dalam hubungan dengan G30S dibiarkan hidup bebas?**

Kita telah melihat dan mengetahui sedikit banyaknya profil orang-orang yang pegang peranan dalam Gerakan 30 September 1965, seperti Letkol. Untung, Kol. A. Latief, Brigjen. Supardjo, dan tokoh misterius Syam Kamaruzzaman yang merupakan gembong G30S. Kita juga bisa melihat hubungan antara mereka dengan Panglima Kostrad Jenderal Soeharto, dus sehingga dengan demikian kita juga bisa melihat bagaimana "hubungan" antara Jenderal Soeharto dengan Gerakan 30 September 1965. Sehingga tanpa susah-susah terjawablah kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang, yang mengatakan "*Sepertinya Soeharto sudah*



*tahu semua, seakan telah direncanakan... Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya”*

Begitu juga Mike Head, wartawan Sydney Morning Herald 19 July 1999 yang mengatakan: *“The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI”*.

Jadi benar sekali kalau Hasan Raid alm. dengan nama samaran Sulangkang Suwalu pada 8 Agustus 1998 menulis dan menyebarkan suatu tulisan dalam berbagai milis, yaitu artikel : G30S/SOEHARTO, BUKAN G30S/PKI (lihat juga [apakabar@access.digex.net](mailto:apakabar@access.digex.net); [http://umarsaid.free.fr/\\_dan GELORA45](http://umarsaid.free.fr/_dan_GELORA45)). Apalagi, sampai matinya tokoh G30S, Kol. A. Latief, tetap mengatakan “Jenderal Soeharto Terlibat G30S!”

## **Jenderal Soeharto**

Membicarakan soal G30S, dan menyoroti tokoh-tokohnya seperti Untung, Latief, Supardjo dan Syam Kamaruzzaman, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyorot pula “tokoh paling penting” dalam masalah G30S dan Peristiwa 1965, yang telah merobah jalannya Revolusi Indonesia, yaitu Jenderal Soeharto.

Menurut satu tulisan Drs. Harsono Sutedjo (Harsutejo), orang tua dan keluarga Soeharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Soeharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di Desa Kemusuk di dekat Yogyakarta.

Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Soeharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Tionghoa.

Soeharto memulai karir militernya sebagai koprak KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) alias tentara penjajah Belanda pada tahun 1940-an di Batalyon XIII di Rampal Malang. Karena “prestasinya” ia segera naik pangkat menjadi Sersan. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota milisi Peta (Pembela Tanah Air). Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945.

SETELAH kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Soeharto menanjak pangkatnya menjadi kolonel, kemudian brigadir jenderal, mayor jenderal, dan sampai menjadi Jenderal Besar (entah siapa yang menaikkan pangkatnya jadi Jenderal Besar!).

Ketika berada di Yogyakarta tahun 1946, dia ikut dalam percobaan kudeta 3 Juli bersama atasannya Mayjen Soedarsono, Komandan Divisi III APRI. Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan peserta kudeta, berbalik menangkapi komplotan kudeta. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan merupakan upaya Soeharto mengamankan komplotan dengan kata lain Soeharto berhasil menyelesaikan “tokoh kudeta” dan atasannya Mayjen Soedarsono. Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat. Nampak, pada awal Indonesia merdeka itu, Soeharto sudah menerapkan politik “bermuka dua”.

Dalam Peristiwa Madiun, ada informasi yang mengatakan bahwa Soeharto, Gatot Subroto dan Kartosuwiryo (yang kemudian jadi panglima DI/TII) adalah para penjagal, pembunuh orang Komunis dalam Peristiwa Madiun dibawah arahan Kolonel A.H. Nasution dan Perdana Menteri Drs. Mohamad Hatta yang menjalankan garis AS yaitu menerapkan politik pembersihan kaum kiri (*Red Drive Proposal*) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme.

Namun, Soeharto terlalu licik, kendatipun ia sebagai penjagal, dia bisa “mencuci tangan” dengan mengatakan suatu kebenaran bahwa memang tidak ada bendera palu arit di Madiun ketika itu, sehingga orang-orang yang pro komunis kemudian hari menganggap bahwa Soeharto adalah orang baik yang bisa diandalkan.

Pada akhir 1956 ketika rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro bocor, terjadi rapat gelap di Kopeng dihadiri sejumlah perwira yang dikoordinir oleh Letkol Soeharto melalui anak buahnya Mayor Yoga Sugamo sebagai Asisten I Divisi di Semarang, Soeharto sendiri tidak hadir. Dari puluhan perwira yang hadir hanya Kolonel dr Suhardi yang menandatangani setuju pencalonan Letkol Soeharto dan menolak pencalonan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam. Soeharto yang ingin merebut kedudukan ini berpacu dengan waktu karena pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Akhirnya komplotan tersebut berhasil.

Seandainya tidak, maka rapat gelap itu akan diusut, dan yang paling terbukti adalah Kolonel dr Suhardi, sedang Soeharto tidak terbukti tersangkut karena Soeharto menjadi ‘Mr Alibi’. Masalah tersebut dicatat juga oleh Ali Murtopo yang ketika itu Kapten dan Komandan Raiders yang diminta Yoga Sugama untuk melakukan operasi intelijen soal pencalonan Soeharto (Yoga Sugama 1990:20-30). Selanjutnya Yoga Sugama mencatat bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suwito Haryoko (Asisten II), Suwarno (Asisten IV), dan Munadi (Asisten V). Ia dan Mayor Suryo Sumpeno berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di MBAD untuk menggagalkan pencalonan Bambang Supeno dan menggantinya dengan Soeharto. Usaha mereka berhasil (Yoga Sugama 1990:80-82).

**Inilah trio pertama Soeharto - Ali Murtopo - Yoga Sugama. Trio ini pula kelak melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Sukarno dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia melibatkan tenaga militer, politisi sipil anti komunis, pengusaha. Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Benny Murdani, AR Ramly, selanjutnya di Malaysia dengan Des Alwi, Prof Sumitro (Yoga Sugama 1990:139; Hanafi 1998:206).**

Trio ini pula kemudian menangani peristiwa G30S. Pagi-pagi pada 1 Oktober 1965 sebelum orang lain mengetahui keadaan yang sebenarnya, Kolonel Yoga menyatakan, “*Ini mesti perbuatan PKI*”. Selanjutnya, “*Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak*”. Selanjutnya Letkol Ali Murtopo mencatat, “*...berdasar penjelasan Pak Yoga kepada Pak Harto, maka kita bertiga kumpul lagi di ruang Pak Harto. Disini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya*” (Yoga Sugama 1990:37,148). Yang dimaksud Ali Murtopo dengan kata ‘lagi’ dalam “*Di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya*”, bahwa komplotan semacam itu telah pernah mereka lakukan sebelumnya ketika merancang operasi intelijen perebutan jabatan Panglima Diponegoro untuk Soeharto seperti tersebut di atas. (Harsutejo).

Waktu Kolonel Soeharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro, dia dikenal sebagai sponsor penyelundupan dan berbagai tindak pelanggaran ekonomi lain dengan dalih untuk kesejahteraan anak buahnya. Soeharto membentuk geng dengan sejumlah pengusaha seperti Lim Siu Liong, Bob Hasan, dan Tek Kiong, konon masih saudara tirinya. Dalam hubungan ini Kolonel Soeharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugama, dan Mayor Sujono Humardani. Komplotan bisnis ini telah bertindak jauh antara lain dengan menjual 200 truk AD selundupan kepada Tek Kiong.

Persoalannya dilaporkan kepada Letkol Pranoto Reksosamudro yang ketika itu menjabat sebagai

Kepala Staf Diponegoro, bawahan Soeharto. Maka MBAD membentuk suatu team pemeriksa yang diketuai Mayjen Suprpto dengan anggota S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo. Langkah ini diikuti oleh surat perintah Jenderal Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo dalam rangka pemberantasan korupsi untuk menjemput Kolonel Soeharto agar dibawa ke Jakarta pada 1959. Ia akhirnya dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto, namun tidak diajukan ke depan pengadilan, melainkan disekolahkan di SESKOAD (Sekolah Staff Komando Angkatan Darat) Bandung.

**Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan menghancurkan mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota Team Pengusut MBAD, yang terdiri dari Mayjen Suprpto, Deputi Pangad sebagai ketua, dengan anggota-anggota Team Mayjen S. Parman, Mayjen Haryono M.T., Brigjen Soetoyo dan Brigjen Panjaitan. Serta penanda tangan Surat Keputusan Pemecatan Panglima Divisi Diponegoro yang tidak lain adalah Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno.**

Di Bandung Kolonel Soeharto bertemu dengan Kolonel Suwanto, Wadan Seskoad, hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Soeharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung yang telah berdiri sejak 1951 ini merupakan sebuah think tank AD, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar dan paling berpengaruh. Seskoad telah menjadi tempat penggodogan perkembangan doktrin militer di Indonesia. Sampai 1989 telah meluluskan 3500 perwira. Para alumninya menjadi tokoh terkemuka dalam pemerintahan. Hampir 100 orang menjadi sekretaris jenderal, gubernur, pimpinan lembaga-lembaga nasional atau badan-badan non departemental. Presiden, Wakil Presiden, dan lebih 30 menteri merupakan alumni Seskoad.

Suwanto sendiri pernah menempuh pendidikan Infantry Advance Course di Fort Benning pada 1954 dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, AS pada 1958. Ia bersahabat dengan Prof Guy Pauker, konsultan RAND (Research and Development Corporation) yang dikunjunginya pada 1963 dan 1966. Suwartolah yang menjadikan Seskoad sebagai think tank politik MBAD, mengarahkan para perwira AD menjadi pemimpin politik potensial (Sundhaussen 1988:245/Harsutejo).

Soeharto, murid baru yang masuk pada Oktober 1959 ini telah mendapatkan perhatian besar dari sang guru. Pada awal 1960-an Soeharto dilibatkan dalam penyusunan Doktrin Perang Wilayah serta dalam kebijaksanaan AD dalam segala segi kegiatan pemerintah dan tugas pemerintahan. Peran Soeharto dalam civic mission menempatkan dirinya dan sejumlah opsir yang condong pada PSI dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang disokong oleh CIA lewat pemerintah AS, suatu program bersifat politik (Scott 1999:81). Pada masa Bandung Kolonel Soeharto inilah agaknya hubungan Suwanto-Syam-Soeharto-CIA mendapatkan dimensi baru (Hanafi 1998:20-25).

Y. Pohan dalam tulisannya mengatakan: “Soeharto sesungguhnya sangat berkepentingan atas tindakan yang diambil oleh Letkol. Untung. Untung bersama kawan-kawannya bertindak terhadap sejumlah jenderal pada tanggal 30 September malam itu. Karena jenderal-jenderal itu adalah rival-rival Soeharto, khususnya Jenderal A. Yani, rival utama yang dianggap sebagai penghalang utama untuk memperoleh kedudukan tertinggi dalam AD. Bukanlah rahasia umum lagi waktu itu di kalangan perwira-perwira AD bahwa Soeharto merasa sangat tidak puas dengan diangkatnya Jenderal A. Yani sebagai Pangad. Putusan Presiden Soekarno mengangkat Jenderal A. Yani tidak bisa diterima oleh Soeharto, karena sebagai perwira TNI ia merasa dirinya lebih senior”.

“Ada fakta sangat keras, dua batalyon AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka

kedok Soeharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Soeharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalyon tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol. Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.” (Catatan Harsutejo).

SEJAK 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah scenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD, *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiusitas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. (Harsutejo)

PROPAGANDA bohong melalui media massa segera memicu kemarahan dan kebencian massa organisasi-organisasi yang sebelumnya memilih politik yang berseberangan dengan PKI dan ormas-ormas kiri pada umumnya. Situasi panas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, dan Partai Katolik untuk membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu), di bawah pimpinan Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik), tapi di belakangnya beberapa perwira Kostrad dengan Brigjen Sucipto sebagai pemrakarsa, yang melalui Adam Malik mendapat curahan Rp50 juta (nilai waktu itu US\$ 1, 2 juta) [informasi dari Jepang mengatakan US\$50 juta dollars dan bukannya Rp50 juta rupiah] dari Kedubes AS di Jakarta untuk mengganyang PKI, membantai dan membunuh orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI diseluruh Indonesia. Partai-partai lain, berikut ormas-ormas yang selama ini bersaing dengan PKI untuk memperoleh dukungan massa, seperti PSII, Partai Kristen Indonesia, bahkan PNI yang menjadi tumpuan Soekarno, bergabung dalam aksi pengganyangan ini, secara langsung maupun tidak. KAP Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi panas menghujat dan menuntut pembubaran PKI. Dan Pemuda “Pancasila” suatu organisasi para-militer dari partai IPKI seperti mendapat durian runtuh, mendapat kesempatan dan menjadi besar kepala dan menjadi organisasi pembunuh yang terkenal.

Setelah situasi matang, maka dilakukanlah gerakan militer untuk melakukan pembunuhan massal dengan menggunakan emosi tinggi sebagian rakyat terhadap anggota PKI dan siapa saja yang dianggap PKI serta pendukung Bung Karno yang lain di Jateng, Jatim, Bali, dan akhirnya di seluruh Indonesia. Hal ini dilanjutkan dengan pembersihan terhadap siapa saja, utamanya aparat yang mendukung BK, pertama-tama AURI selanjutnya di kalangan ABRI yang lain. Muaranya ialah menjatuhkan Presiden Sukarno. Inilah yang dikehendaki oleh CIA/AS dan dilaksanakan oleh anteknya yaitu Jenderal Soeharto.

Kita telah lihat bagaimana ‘hubungan’ Soeharto dengan para pentolan G30S dan bagaimana ‘peranan’ Soeharto dalam ‘organisasi’ G30S itu. Betapa kelicikan dan kelihaiyannya bermain dalam berbagai bidang. Bersekutu dengan Untung, Latief dan Supardjo (G30S) untuk menyapakan para Jenderal yang menjadi lawan-lawannya; bersekutu dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo (Gestok) untuk menelikung dan menyapakan Untung, Latief dan Supardjo guna menghapus jejaknya; dan bersekutu dengan Kolonel Soewarto dan Prof. Guy Pauker tokoh CIA/Amerika di Seskoad.

Namun, kisah tentang Soeharto ini tidak berhenti hanya sampai disini. Masih banyak hal-hal yang membukakan kelicikan, kelihayan dan penipuan “anak Kemusuk” Soeharto ini. Mari kita ikuti berbagai cuplikan yang dapat kita kumpulkan, mengenai manusia yang satu masa diberi gelar sebagai ‘opsir koppig’ oleh Presiden Indonesia Bung Karno.

Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latief sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Soeharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Soeharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawahan PKI bersama Letkol Untung dan Jenderal Soeharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?] sebagai bagian dari Biro Khusus PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Soeharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit menyatakan, **“Wah celaka, kita ditipu oleh Soeharto!”** Demikian yang diceritakan oleh seseorang yang pernah bekerja di kantor CC PKI. (Harsutejo: *Sekitar G30S, Soeharto, PKI dan TNI-AD*).

Jika Soeharto bukan dari bagian komplotan, maka Latief yang telah menemuinya sampai berkali-kali dan menyampaikan tentang gerakan yang sedang diikutinya merupakan pembocoran rahasia gerakan sebagai yang dituduhkan sementara orang. Bahkan ada juga yang menuduhnya ia berkhianat terhadap gerakan, padahal kepergiannya setahu Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Latief mempunyai hubungan dekat dengan bekas atasannya, tentunya sedikit banyak ia tahu tentang pandangan politik Soeharto. Apalagi justru Jenderal Soeharto yang memanggil dan menginspeksi pasukan Yon 530 Brawijaya dan Yon 434 Diponegoro yang dianggap terlibat G30S. Setidaknya menurut Syam pasukan itu mendukung gerakan meskipun kita tidak dapat melihat di mana letak dukungannya itu, kecuali sebagian pasukan Yon 434 Diponegoro yang hendak mengundurkan diri ke PAU Halim dan yang ditolak oleh pihak AU, lalu berada di pinggiran Halim. Mereka ini yang terlibat kontak senjata dengan pasukan RPKAD.

Menurut sebagian orang, kesalahan lain yang merupakan kesalahan fatal dari orang-orang PKI, adalah kesalahan dalam menilai pribadi Jenderal Soeharto. PKI bukan saja tidak menempatkan Jenderal Soeharto sebagai jenderal kanan-reaksioner yang harus masuk dalam “black-list”, bahkan dikategorikan sebagai “sekutu”, sebagai Jenderal yang kalau perlu bisa dimintai “bantuan”. Mungkin ini disebabkan hanya karena ketika **Jenderal Soeharto sebagai utusan Moh. Hatta untuk meninjau Madiun (yang dikenal umum dengan "Peristiwa Madiun" 1948), telah memberikan laporan yang objektif, bahwa: “di kota Madiun ketika itu tidak ada gejala-gejala pemberontakan PKI, tidak ada bendera Merah Putih yang diturunkan dan tidak ada bendera palu-arit yang berkibar; penjara-penjara juga tidak menjadi penuh oleh pasukan yang ditawan. Semua berjalan lumrah!”** (G30S DIRANCANG UNTUK GAGAL - Harsutejo). (Namun, adakah PKI memeriksa atau mengecek “laporan yang objektif” Soeharto ini, karena ternyata setelah itu, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh PKI di Madiun oleh Militernya A.H. Nasution/Gatot Subroto tetap berlangsung? - pen)

Bahkan kalau kita baca dalam artikel yang disiarkan oleh ExLibris1965 beberapa waktu yang lalu ada beberapa hal penting akan apa yang dikatakan oleh A. Latief.

“Menurut Latief, jika G/30S/1965 berhasil, Soeharto diharapkan menjadi pembantu setia Bung Karno, tetapi situasi berubah cepat, Soeharto tidak setia kepada Bung Karno dan tidak mendukung G/30S, melainkan melawan dan menghancurkannya. Tindakan Latief ini didasarkan pada intuisi persahabatan, bahwa ia dipercaya oleh Soeharto sahabat karibnya. Secara politik, sebagai pimpinan gerakan, tindakan Latief tersebut adalah merupakan “pengkhianatan”, karena ia mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan politik. Sebagai pimpinan gerakan, seharusnya Latief tidak melakukan hal itu; itu menunjukkan bahwa mental politik Latief tidak mewakili kepentingan kelasnya. Menurut Soengkowo, mantan Perwira Polisi Militer, salah seorang pelaku G30S/1965,

menjelaskan bahwa pada waktu Latief diadili di Mahmilub selalu melibatkan Soeharto, bahwa Soeharto mengetahui gerakan itu, dan secara langsung maupun tidak langsung Soeharto terlibat di dalamnya. Apa yang disampaikan Latief itu adalah suatu siasat bahwa ia adalah bukan orangnya Soeharto dan supaya tidak dinilai negatif (atau supaya tidak dikutuk) oleh kawan-kawannya dalam G30S/1965. Pada waktu Soengkowo dan Untung di tahan di Rumah Tahanan Salemba Blok N, Soengkowo bertanya kepada Untung, mengapa Soeharto tidak ikut ditangkap? Untung menjelaskan bahwa dalam Sentral Komando atau Senko terjadi perbedaan pendapat tentang Soeharto; ada yang berpendapat bahwa Soeharto adalah pro-G30S/1965 dan loyal kepada Bung Karno, dan ada yang berpendapat bahwa Soeharto adalah kontra gerakan G30S/1965. Yang berpendapat bahwa Soeharto adalah loyal terhadap Bung Karno dan pro dengan G30S/1965 adalah Latief dan Syam Kamaruzaman (pimpinan Biro Khusus PKI), sedangkan yang berpendapat bahwa Soeharto adalah kontra G30S/1965 adalah saya sendiri (Untung) dan Mayor Udara Soeyono; agar supaya gerakan sukses, menurut Untung, ia dan Soeyono mengalah tidak menangkap Soeharto, walaupun Soeharto juga anggota Dewan Jenderal. Ternyata Soeharto adalah Jenderal yang melawan Bung Karno, ia merebut kekuasaan Bung Karno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Berdasarkan kenyataan yang demikian ini, Latief harus bertanggungjawab kepada kawan-kawannya korban rezim Soeharto, karena seandainya Latief tidak memberitahu Soeharto pada tanggal 30 September 1965 jam 9 malam di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto, kemungkinan kondisi Republik Indonesia tidak seperti sekarang ini” (Dr. Darsono Prawironegoro ANALISIS GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT 28 Februari 2001).

Nah, kita lihat di atas, semua berlepas tangan tentang Soeharto. Latief berlepas tangan bahkan menuduh Soeharto, Untung berlepas tangan dengan mengemukakan “perbedaan pendapat” mengenai Soeharto didalam Sentral Komando (Senko). Jadi mereka semua dalam hal ini sepertinya “tidak tahu” tentang Soeharto. Dus, dalam komplotan ini, satu-satunya yang kemungkinan besar tahu adalah Syam Kamaruzaman. Dan sudah barang tentu Soeharto sendiri!

Beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa G30S, didunia luar sudah santer dibicarakan hal hal yang bakal terjadi dan akan merubah Indonesia.

Dalam bulan Desember 1964, seorang Duta Besar Pakistan di Eropa melaporkan kepada Menlu Zulfikar Ali Bhutto tentang hasil percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bertugas di NATO yang menginformasikan bahwa **sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal, dengan begitu terbukalah secara legal bagi AD Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat. “Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksana sebuah apel busuk”.**

Dan dalam sebuah pesta di Eropa sebelumnya, Gilchrist (Duta Besar Inggris di Indonesia) pernah berkata bahwa **“satu kali tembakan akan mengubah Indonesia”**. Belakangan baru terungkap, Dubes Inggris-lah yang mempersiapkan skenario operasi anti-PKI dengan isu amoral, asusila, dan anti agama yang kemudian dilansir ke sejumlah koran ibukota seperti Merdeka, Berita Yudha, dan Angkatan Bersenjata. Mengapa Imperialis Barat bisa begitu cepat tahu dan mempunyai kesimpulan demikian? Tentu ada sesuatu!

Marilah kita kembalikan ingatan kita pada saat-saat ketika Pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang dapat dengan mudah dihancurkan. “Kegagalan yang dialami Amerika - Inggris dengan proyeknya Pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958, membuatnya sadar, setelah mendapat advis dari Belanda, bahwa **“usaha dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dapat berhasil”**, karenanya Sekutu mulai melakukan usaha dan **pendekatan** ke Pusat.

Dan bersamaan dengan dilaksanakannya program-program 'pendekatan ke Pusat' tersebut, dengan diam-diam dilakukan *talent scouting* (mencari calon jago berbakat) oleh perwira tinggi bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Van der Plas. Dalam pemilihan “Talent Scouting” (mencari

calon jago berbakat) itu terpilihlah Soeharto, karena dia memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Dia terpilih untuk menjadi jago utamanya sang imperialis guna mengobok-obok Indonesia dari dalam. Sampai dimanakah kejagoannya Soeharto? Apakah sekedar sebagai Panglima Kostrad yang bisa menghancurkan G30S dan memusnahkan Komunis dengan kekuatan senjata setelah 1 Oktober 1965. Lalu mengapa Imperialis jauh-jauh hari sudah sesumbar bahwa: 'satu kali tembakan akan mengubah Indonesia' dan 'Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksana sebuah apel busuk'. Mengapa Imperialis begitu yakin akan hal itu? Tentu mereka telah memperhitungkan, melakukan taktik dan usaha karena ada 'kekuatan' atau 'tokoh' yang berdiri dipihak mereka yang akan bertindak dan bergerak demi kepentingan mereka. Siapakah kekuatan itu? Apakah Syam Kamaruzzaman yang dikatakan sebagai Ketua Biro Khusus PKI, walaupun menurut info, dia sebenarnya adalah Mayor AD namun tak punya militer dan senjata, ataukah Soeharto, Jenderal yang mempunyai kekuatan militer dan persenjataan dan sudah dinobatkan sebagai 'Jago Berbakat' yang penuh dengan ambisi balas dendam?

Tahun 1955 Indonesia melangsungkan Pemilihan Umum pertama secara Demokratis. Diberbagai propinsi di Indonesia, banyak para petinggi militer yang menjadi pemimpin/pengawas Pemilu. Begitu juga di Jawa Tengah, di daerah komando militer Diponegoro, dimana Kolonel Soeharto sebagai Pangdam, menjadi Pengawas tertinggi Panitia Pemilu Jateng bagian Timur. Soeharto aktif mengawasi partai-partai yang maju ke pemilu. Begitupun partai-partai peserta, sibuk menggarap dan mengkampanyekan partainya agar keluar sebagai pemenang dalam pemilu bulan September 1955 itu. Dan dalam hal ini tak ketinggalan PKI, Partai Komunis Indonesia yang dijadikan legal pada tahun 1952 dibawah pimpinan Aidit, Lukman dan Njoto, Sudisman dan Oloan Hutapea, setelah partai itu babak belur dihantam oleh militer pimpinan Gatot Subroto dan Soeharto di Madiun pada September 1948 atas perintah Perdana Menteri Mohamad Hatta dan A.H. Nasution. Soeharto melihat sendiri kemajuan pesat PKI yang tahun 1948 dihancurkannya di Madiun. Dan dia sebagai Pengawas Pemilu di Jateng melihat sendiri kemenangan PKI yang dapat meraih nomor 4 besar sesudah PNI, Masyumi dan NU.

Orang-orang Komunis yang selamat dari pembunuhan dalam Peristiwa Madiun itu tahu benar siapa Soeharto. Soeharto yang memang licik, yang selalu bermuka dua semenjak 1946, pernah membuat suatu pernyataan yang memang benar yaitu ketika Jenderal Soeharto sebagai utusan Moh.Hatta untuk meninjau Madiun (yang dikenal umum dengan "Peristiwa Madiun" 1948), telah memberikan laporan yang objektif, bahwa: "di kota Madiun ketika itu tidak ada gejala pemberontakan PKI, tidak ada bendera Merah Putih yang diturunkan dan tidak ada bendera palu-arit yang berkibar; penjara-penjara juga tidak menjadi penuh oleh pasukan yang ditawan. Semua berjalan lumrah!" Laporan ini memang sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang ada bahwa memang sesungguhnya tidak ada pemberontakan PKI. Namun, yang benar dan berlangsung adalah provokasi dan pembunuhan terhadap anggota-anggota PKI di Madiun oleh Gatot Subroto dan Soeharto. Gatot Subroto membunuh Amir Syarifuddin mantan Perdana Menteri Republik Indonesia yang komunis, dan pimpinan-pimpinan PKI lainnya atas perintah Perdana Menteri Drs. Mohamad Hatta yang mengikut dan melaksanakan politik yang diarsiteki oleh Marle Cochra'n, yaitu politik "Red Drive Proposal", yang adalah bertujuan membersihkan kesatuan militer dari golongan komunis, sebagai realisasi Doktrin Truman, Presiden AS, yang disebut "policy of containment" 1946 di Asia, yaitu **membendung Komunisme**, dan selanjutnya diperkuat dengan doktrin rollback Presiden Eisenhower 1949 yaitu bahwa **Komunis tidak hanya dibendung, tapi harus dibasmi**.

Jadi jelas sekali, dan bisa kita lihat, tahun 1946 Soeharto bermuka dua dalam "Kudeta 3 Juli" yang mengorbankan seorang petinggi militer yaitu Brigjen Soedarsono, kini tahun 1948 dalam Peristiwa Madiun, lagi Soeharto bermuka dua alias bermain muka-belakang. Namun, bagi kader-kader yang tidak mengenal Soeharto secara dekat, berusaha untuk mendekati dan menggarapnya, dengan harapan mudah-mudahan kelak bisa dipergunakan. Terlebih disaat menjelang Pemilu Indonesia yang pertama tahun 1955. Dan Soeharto, karena politik bermuka dua dan berdasarkan kepentingan laba-rugi, menggunakan setiap kesempatan, menunjukkan seolah-olah bersimpati dan mudah



digarap. Apalagi setelah kejahatan kriminalnya di Kodam Diponegoro terbongkar dan ketahuan oleh pimpinan Angkatan Darat, Soeharto seolah-olah memperlihatkan kesediaannya untuk bekerjasama dengan kader-kader PKI angkatan sesudah Peristiwa Madiun, terutama dengan D.N. Aidit dan Syam Kamaruzzaman yang memang sudah dikenalnya secara dekat semenjak dalam Grup Pemuda di Pathuk Yogyakarta tahun 1946.

Ketika terjadi Peristiwa Madiun 1948, D.N. Aidit berada di Yogyakarta dirumah ayahnya Sidhartoyo, seorang feodal Keraton, dimana Sidhartoyo sendiri pada waktu itu adalah Ketua Pemuda dalam lingkungan Keraton. Menurut kabar, di Jogja inilah Aidit menjadi Komunis melalui Sidhartoyo dan Wikana pada tahun 1949. Karena itu jugalah Aidit selamat dari pembunuhan terhadap kaum komunis yang dilakukan Soeharto dan Gatot Subroto atas perintah A.H. Nasution, karena Aidit tidak berada di Madiun, apalagi ketika itu dia belum menjadi anggota Komunis. Setelah menjadi anggota Partai, karena pimpinan yang kosong pada Januari 1951, Aidit-Lukman-Njoto-Oloan Hutapea dan Sudisman memimpin CC-PKI.

Setelah Pemilu 1955 dimana PKI keluar sebagai Pemenang Nomor 4 sesudah PNI, Masyumi dan NU, maka Sidhartoyo 'anak keraton' yang sebelumnya adalah Ketua Pemuda Keraton di Yogyakarta, yang juga tidak asing bagi Soeharto yang selalu keluar masuk Keraton dizaman revolusi, karena ketika itu Soeharto adalah Komandan Batalyon di Yogyakarta, Sidhartoyo dipindahkan ke Medan Sumatera Utara dan menjabat sebagai Sekretaris CDB-PKI menggantikan Jusuf Ajitorop yang ditarik ke Jakarta duduk di Politbiro CC-PKI dan menjadi anggota DPR/MPRS dari Fraksi PKI.

Dalam situasi dan kondisi dimana 'anak keraton' Sidhartoyo menjadi Sekretaris CDB-PKI Sumatera Utara di Medan inilah, si 'Anak Lembu Peteng' Soeharto, mendatangnya ke Medan yang dengan secara rahasia menyatakan sumpah menggabungkan dirinya dengan PKI. Menjadi anggota atau calon anggota PKI bukanlah suatu hal yang mudah. PKI mempunyai AD/ART tentang penerimaan seseorang menjadi anggota atau calon anggotanya dan punya disiplin yang tinggi. Namun, penerimaan Soeharto menjadi calon anggota PKI oleh Sekretaris CDB-PKI Sumatra Utara Sidhartoyo adalah disaksikan oleh dua tokoh besar yaitu Syam Kamaruzzaman dan Sidhartoyo bahkan tentu juga D.N. Aidit, yang sudah tidak asing lagi buat Soeharto semenjak di Grup Pemuda Pathuk tahun 1946 yang terdiri dari Sutan Syahrir, Mohamad Yamin, Brigjen Soedarsono, Soeharto, Aidit dan Syam Kamaruzzaman. Dan sebagai tradisi setiap anggota atau calon anggota komunis yang disumpah, maka Soeharto menggunakan nama Dalimo sebagai namanya, tidak jauh berbeda dengan nama kecilnya ketika di Kemusuk yaitu Dalimi yang kemudian bertukar menjadi Soeharto. Hal ini diketahui dan diinformasikan oleh Pejuang Kemerdekaan Sidik Kertapati kepada seorang yang pernah bertugas di CC-PKI Jakarta, ketika sama-sama berada di Tiongkok pada tahun 1965. Bahkan, ditambahkan juga, bahwa Soemarsono, pejuang kemerdekaan, pemimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda dan Sekutu di Surabaya pada 10 Nopember 1945, yang saat itu berada di Sumatra Utara, juga mengetahui perihal kunjungan dan maksud rahasia Soeharto kepada Sidhartoyo itu.

**Masuknya Soeharto menjadi anggota atau calon anggota PKI ini, perlu di pertanyakan. Bagaimana mungkin sipembunuh orang-orang Komunis di Madiun tahun 1948, sekarang begitu mudah saja masuk menjadi simpatisan dan calon anggota Komunis? Bukankah ini sama saja dengan memasukkan serigala ke kandang domba? Apakah ini disebabkan karena belang Soeharto yaitu penyelundupannya di Kodam Diponegoro telah terbongkar, ataukah semacam mencari suatu backing kekuatan karena dia juga dipecat dari kedudukannya sebagai Pangdam Diponegoro, dan juga diketahuinya bahwa Bung Karno sendiri cenderung sayang kepada PKI, ataukah memang taktik Nekolim yang memang licik, menyelundupkan Soeharto ke dalam tubuh PKI (melalui Kamaruzzaman yang merupakan agen ganda) sehingga dengan itu, Imperialis sudah benar-benar mempunyai 'jago' yang 'bekerja didalam' sehingga mudah berkoar-koar bahwa "satu kali tembakan akan mengubah Indonesia' dan**



**‘Indonesia akan jatuh kepangkuan Barat laksana sebuah apel busuk’. Dan juga bahwa di Indonesia akan ada “ kudeta yang dirancang gagal”.**

Dengan telah berhasilnya penyusupan dan penyelundupan secara rahasia Soeharto dalam tubuh PKI, maka Soeharto secara rahasia pula leluasa berbuat apapun untuk menunjukkan “keloyalannya” terhadap PKI, kepada Aidit dan terutama kepada Syam Kamaruzzaman (dalam hal militer, Kamaruzaman yang berhak menentukan, bukannya Aidit). Kamaruzaman dan Sidhartoyo-lah yang menanggungnya secara “hukum dan peraturan Partai” hingga Soeharto bisa masuk menjadi 'keluarga PKI'. Setelah dianggap loyal, Soeharto antara lain berusaha memasukkan “orangnya” untuk memegang jabatan di kantor CC-PKI di Kramat Raya nomor 81 Jakarta, yaitu Datong Sugiharto yang ditempatkan di Departemen Luar Negeri CC-PKI dibawah Iskandar Subekti dan Karel Supit.

Datong Sugiharto adalah seorang Pangeran di Yogyakarta dan menyandang titel feodal Raden Mas. Dia bersekolah di SMP, SMA dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) Yogyakarta, lalu menjadi Ketua Umum IPPI Jateng, kemudian menjadi Ketua Umum IPPI seluruh Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dikenal dengan alamat Batanawarsa 23 Yogyakarta. Dalam Kongres di Bandung, IPPI diambilalih oleh Teddy Kardiman dan Budiman Soedharsono. IPPI Jogja dibawah Datong tidak melakukan “perlawanan” karena Datong Sugiharto kemudian melanjutkan pelajarannya ke Atekad (Akademi Teknik Angkatan Darat) namun dipecat, lalu diambil oleh Soeharto dan dimasukkan ke Fakultas Teknik Sipil di Universitas Gajah Mada tahun 1958.

Dalam penutupan Kongres ke 7 PKI tahun 1963 yang dilangsungkan digedung SBKA Manggarai, D.N. Aidit menampilkan Datong Sugiharto dan mengatakan bahwa dialah yang mengatur semua konsumsi buat peserta selama Kongres, namun bahwa Soeharto dibelakang itu, tidak disebutkan. Kemudian atas usulan Soeharto, Aidit menempatkan Datong Sugiharto di Departmen Luar Negeri CC-PKI dibawah Iskandar Subekti dan Karel Supit, seperti telah disebutkan diatas, walaupun Oloan Hutapea tidak menyetujui Datong masuk dan duduk di kantor CC. Maka dengan duduknya Datong di kantor CC, jadilah Datong Sugiharto sebagai penghubung antara Soeharto dan PKI.

Ketika Ulang Tahun ke-45 PKI pada 23 Mei 1965, perayaan itu disemarakkan dengan drumband yang luar biasa, yang dilatih di Akademi Militer Nasional di Magelang sebagai sumbangan dari Soeharto/ Kostrad, namun tidak pernah dipublikasikan.

Informasi lebih jauh mengatakan bahwa ayah Datong Sugiharto adalah adiknya Sultan Hamengku Buwana IX. Maka dapat disimpulkan bahwa Datong Sugiharto masih mempunyai hubungan keluarga dengan Jenderal Soeharto, sebab Soeharto adalah saudara tiri HB-IX, maka ini berarti bahwa Datong adalah keponakan Soeharto. Informasi yang diterima dari Patangpuluhan Yogyakarta mengatakan bahwa Pangeran Datong waktu kecilnya belajar di Sekolah Keputran (khusus untuk anak-anak golongan tinggi kerajaan) karenanya tidak mungkin menjadi proletar.

Dan ketika Datong telah “duduk” sebagai pejabat di kantor CC-PKI, maka melalui “jaluran Khusus Intel Militer” ia disekolahkan di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) bersama-sama Syam Kamaruzzaman dan Syamsir Suwanto (supirnya D.N. Aidit). Datong, kendatipun statusnya di CC hanyalah seperti “pegawai” namun dia telah berani membuka suara dan mengatakan tentang adanya klik-klik di CC seperti grup Medan, Jawa, Sunda, yang berkemungkinan untuk memecah dari dalam. Bahkan Suripno alias Iskandar Subekti yang juga adalah Panitera CC-PKI telah melihat sendiri, dan mengatakan kepada bawahannya pada Agustus 1965 bahwa “*Partai sudah pecah. Dewan Djenderal itu tidak ada; itu hanyalah karangan Syam dan Inggris*”.

Dan semenjak Soeharto yang licik berhasil menyusup ketubuh PKI, maka banyak para petinggi militer yang menampakkan diri se-olah-olah simpati kepada PKI. Bahkan ada anggota anggota PKI sendiri yang menduga bahwa para militer yang ketika itu begitu baik dan simpati kepada PKI, dianggap sebagai “orang kita”, seperti misalnya Umar Wirahadikusuma, Amir Mahmud, Sunaryadi dll. (info asli dari Ruslan Wijaya Sastra atau Rustomo). Dan semenjak itu pula, secara rahasia

Soeharto makin leluasa dan makin intim dengan PKI.

Namun Soeharto adalah Soeharto! Dajal bermuka dua penuh kelicikan dan kebusukan yang bersembunyi dibalik senyum sinisnya, senyum dendam dan selalu bermain muka dan belakang! Senyum yang diumbar yang tak lain adalah senyum ngenyek, sinis, untuk menunjukkan kepada umum sebagai interpretasi: “*Iti lho aku. Siapa yang nggak sukak thak gebug*”. Ketika disekolahkan ke Seskoad di Bandung, Soeharto bersama-sama dengan Datong Sugiharto, Syam Kamaruzzaman dan Syamsir Suwanto merupakan satu grup yang terdiri dari 4 orang. Ketika berada di Seskoad Bandung inilah, Kolonel Soeharto bertemu dengan Kolonel Suwanto, Wadan Seskoad. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Soeharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung yang telah berdiri sejak 1951 ini merupakan sebuah think tank AD, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar dan paling berpengaruh. Ketika Kolonel Soeharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Poulgrain. Hubungan mereka begitu menjelimet penuh rahasia. Kolonel Suwanto dididik di Amerika, pernah menempuh pendidikan Infantry Advance Course di Fort Benning pada 1954 dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, AS pada 1958. Ia bersahabat dengan Prof Guy Pauker, konsultan RAND (Research and Development Corporation) yang dikunjunginya pada 1963 dan 1966. Suwantolah yang menjadikan Seskoad sebagai think tank politik MBAD, mengarahkan para perwira AD menjadi pemimpin politik potensial (Sundhaussen 1988:245/Harsutejo).

Soewarto adalah sahabat Prof. Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Berkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwanto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwanto-lah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut *civic mission* AD, yang sebenarnya merupakan *civic action* CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan Angkatan Darat. **Lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA, yaitu Soeharto - Soewarto dan Prof. Guy Pauker. Pada masa Bandung inilah hubungan Suwanto – Syam – Soeharto - CIA mendapatkan dimensi baru** (Hanafi 1998:20- 25/Harsutejo).

Sekarang, nyata dan terbukalah siapa **sesungguhnya** Soeharto! Soeharto seorang perwira militer yang dari semula anti komunis, pembunuh para komunis di Madiun tahun 1948, terpilih oleh Imperialis sebagai jagonya, berhasil menyusup ketubuh PKI, lalu dengan sifat muka duanya menjadi agen CIA dibawah Kolonel Soewarto dan Prof. Guy Pauker. Dengan adanya Soeharto dalam kedudukan begini, maka Imperialis tak segan-segan malahan bangga mengeluarkan kata-kata: “satu kali tembakan akan mengubah Indonesia” dan “Indonesia akan jatuh kepangkuan Barat laksana sebuah apel busuk”. Dan untuk itu semua, Soeharto menggunakan dan memberi semangat Letkol. Untung, Kolonel Latief untuk menghabisi semua rivalnya di Kodam Diponegoro, dan dengan rekayasa yang licik, menghancurkan PKI yang berhasil disusupinya dan agar rahasia dirinya tidak terbuka, segera membunuh para pimpinan PKI terutama D.N. Aidit, Nyoto, Lukman serta pimpinan-pimpinan teras tak ketinggalan Sidhartoyo, Sekretaris CDB-PKI Sumatera Utara yang tahun 1957 menerima Soeharto alias Dalimo masuk menyusup ketubuh PKI. Dan sesuai dengan doktrin Truman policy of containment 1946 di Asia, yaitu membendung Komunisme, **dan selanjutnya diperkuat dengan doktrin rollback Presiden Eisenhower 1949 yaitu bahwa Komunis tidak hanya dibendung, tapi harus dibasmi**, maka Soeharto-lah dajalnya, Soeharto-lah dalangnya, Soeharto-lah biang keroknya, Soeharto-lah yang melakukan perintah Imperialis untuk melakukan pembunuhan 3 juta rakyat Indonesia yang dituduh sebagai komunis. Jadi, Gerakan 30 September yang telah berubah menjadi Gerakan 1 Oktober – Gestok sesungguhnya adalah gerakan Soeharto yang menyusup ketubuh PKI untuk menghancurkan PKI. Jadi tidak heran, kalau ada keterangan menarik, ketika D.N. Aidit baru saja sampai dari Jakarta, ia mengatakan, “**Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto.**” Demikian yang diceritakan oleh seseorang yang pernah bekerja di

kantor CC PKI Jakarta. Sayang keterangan ini tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain yang memadai. (Harsutejo: Sekitar G30S, Suharto, PKI dan TNI-AD).

Namun sekarang, keterangan itu menjadi gamblang, menjadi jelas mengapa Aidit seorang Menteri R.I., seorang Ketua CC-PKI berkata demikian, setelah kita mengetahui tentang penyusupan Soeharto ketubuh PKI ini. Dan Soeharto langsung memerintahkan Yasir Hadisubroto untuk membereskan D.N. Aidit Menko/Ketua PKI, tanpa diproses pengadilan agar tidak terbongkar rahasia bahwa Soeharto adalah PKI binaan Syam, dan Sidhartoyo, dan diketahui oleh almarhum pejuang Sidik Kertapati dan pemimpin perjuangan 10 Nopember di Surabaya, Soemarsono. (Catatan: Ketika A. Umar Said masih hidup dalam pembuangan di Paris dan penulis sempat bertanya padanya dalam pembicaraan telepon jarak jauh, dengan terbata-bata karena akibat strook, beliau mengatakan bahwa “teman-teman dalam militer sudah ‘menggarap’ Soeharto semenjak tahun 1955, ketika Soeharto menjabat sebagai Kepala Pengawas Pemilu Jawa Tengah Tahun 1955”. Dan ketika Semaun Utomo yang pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Sejarah CC-PKI masih hidup di Semarang, penulis pernah mengirimkan email 3 atau 4 kali khusus menanyakan kepada beliau perihal “penyelundupan Soeharto kedalam tubuh PKI ini”, namun sampai meninggal beliau tidak memberi jawaban. Mungkin itu jalan yang terbaik” buat beliau sebagai Ketua Bagian Sejarah CC-PKI. Namun, secara nalar, kita bisa mempelajari dan tahu siapa itu Soeharto). Dengan kita ketahui, siapa SESUNGGUHYNYA Soeharto ini, maka jelaslah bahwa G30S bukanlah G30S/PKI tetapi adalah G30S/Soeharto, karena Soeharto-lah dalangnya, Soeharto-lah otaknya dan Soeharto-lah pelaksana tugas Imperialis AS, Presiden Eisenhower yang mempunyai doktrin rollback 1949 yaitu bahwa **Komunis tidak hanya dibendung, tapi harus dibasmi**. Dan Soeharto sebagai serigala imperialis, begitu gairah memburu dan membasmi komunis sampai ke-akar-akarnya, lalu maju meng kudeta Bung Karno yang memang tidak disukai oleh Imperialis Inggris Amerika semenjak pemberontakan PRRI 1958. (Pertemuan antara Presiden Kennedy dengan PM Inggris Harold McMillan, pada April 1962, di mana keduanya sepakat tentang kehendak untuk melikuidasi Soekarno pada saatnya yang tepat, untuk itu dinas intelejen (CIA dan MI6) bekerja sama saling mengisi untuk merealisasikannya. Dan “saat” yang tepat itu adalah ketika pencetusan G30S yang dirancang gagal oleh Soeharto).

Dan setelah Soeharto, serigala yang berhasil menyelundup kekandang domba memperlihatkan warna aslinya, dan berhasil mengobrak-abrik dan membunuh kawan domba, maka para pengikutnya dan orang-orang Soeharto yang “ditempatkan” diberbagai sudut dan pojok, juga mulai menampakkan belang yang sesungguhnya. Seperti Umar Wirahadikusuma, Pangdam V Jakarta Raya yang “terpaksa” harus mengumumkan Jam Malam buat Jakarta mulai 1 Oktober 1965 sehingga koran-koran Angkatan Darat leluasa menebarkan segala fitnah dan rekayasa; Amir Machmud yang katanya “orang kita”, yang juga tercantum sebagai anggota “Dewan Revolusi”nya si Letkol. Untung, juga menunjukkan keasliannya dengan menjadi antek Soeharto dalam menodong Bung Karno untuk mendapatkan SP-11 Maret. Bahkan ketika Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Dalam Negeri, justru Amir Machmud yang membuat Peraturan Mendagri Nomor 32/1981 yang sangat tidak berperikemanusiaan dengan memuat semua peraturan larangan untuk segala kegiatan dan pekerjaan bagi orang-orang yang diduga terlibat ada indikasi dengan PKI. Ada 9 macam pekerjaan yang tidak diperbolehkan, termasuk juga anak-anak orang yang diduga terlibat, tidak dibenarkan menikah dengan pejabat negara, militer, polisi dan pegawai pemerintah.

Begitu juga Datong Sugiharto, feodal Keraton Jogja yang diselundupkan kekantor Departmen Luar Negeri CC-PKI dan menjadi penghubung antara Soeharto dan PKI, setelah 1 Oktober 1965, juga menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia menjadi interogator yang kejam dan biadab terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Salah satu korbannya yang disiksa dan dianiaya oleh Datong Sugiharto adalah Trikoyo Ramijo, anak pak Ramijo seorang pejuang yang dibuang ke Boven Digul membawa Trikoyo kecil yang lahir pada tahun 1926. Akibat siksaan tanpa perikemanusiaan Datong Sugiharto ini, Trikoyo sampai masa tuanya menjadi manusia impotent.

Jadi sesumbar Imperialis bahwa “satu kali tembakan akan merubah Indonesia” sungguh terjadi

karena ada serigala imperialis yang senantiasa mengumbar senyum sinis di dalam kandang domba, yaitu Jenderal fasis Soeharto.

Imperialis Barat berhasil menumbangkan Bung Karno dan membunuh jutaan komunis tanpa melakukan peperangan atau intervensi militer seperti Vietnam dan tempat-tempat lain. Cukup menggunakan seorang boneka yang licik penuh dendam, anjing serigala pembunuh yaitu Jenderal Soeharto! Karena Soeharto adalah segala-galanya maka tidak heran kalau Soeharto jugalah yang merancang G30S supaya gagal seperti yang dicanangkan Imperialis jauh sebelumnya.

Sekarang, kiranya semua pertanyaan dan teka-teki selama ini tentang G30S dan Gestok, akan lebih mudah diberi jawaban. Dan semua itu akan menuju dan menjurus kepada satu orang yaitu Jenderal fasis Soeharto. Jadi, kalau kita renungkan, apa yang yang diuraikan oleh Bung Karno dalam pidato Nawaksara dalam memberi keterangan dalam Sidang Umum MPRS, berkaitan dengan G30S yaitu bertemunya tiga sebab, ada kebenarannya. Soeharto sebagai (c) *oknum yang tidak benar* dalam tubuh Angkatan Darat, yang gampang dan mudah diperalat dan dipergunakan oleh (b) *nekolim yang cerdik dan lihay* dan (a) *keblingernya pimpinan PKI* yang mudah terprovokasi. Pimpinan PKI seolah-olah telah mempercayakan “komando” kepada seorang Soeharto yang dengan mudah dan licik telah dapat menyusup kedalam kandang PKI. Ini dapat dibuktikan dengan ketidaktahuan D.N. Aidit pada malam 30 September 1965 itu. Dia dibangunkan dan diculik dari rumahnya, dibawa ke Halim Perdana Kusuma, selanjutnya diterbangkan ke Jawa Tengah tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah semua menjadi porakporanda, maka bersuaralah sang Ketua: "Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto." Sebuah kalimat pendek yang mempunyai arti sangat besar.

“Penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tercakup diantaranya adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa yang merupakan suatu rangkaian yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa”. **Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa 1965/1966 Komnas HAM, Nur Kholis, dalam jumpa pers di kantornya menyatakan bahwa “salah satu unit negara yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah struktur Komando Pemulihan dan Keamanan (Kopkamtib) yang dipimpin oleh mantan presiden Soeharto, yang memimpin, menjadi Pangkopkamtib, dari 1965 dan 1967, serta antara 1977 dan 1978”.**

**Komnas HAM mendesak “supaya para pejabat militer yang terlibat dibawa ke pengadilan”. “Kami meminta agar hasil penyelidikan ini ditindaklanjuti secara hukum oleh Kejaksaan Agung,” ujar Nur Kholis sambil menyerahkan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM selama 4 tahun itu kepada Kejaksaan Agung RI pada 20 Juli 2013.**

Kini, dalam mengenang dan memperingati 52 tahun kedajalan dan kebiadaban fasis Soeharto dalam menenyapkan satu golongan politik dari bangsanya yang dituduh G30S/PKI dengan menggunakan gerakannya sendiri yaitu Gestok “Gerakan 1 Oktober” yang dilakukannya secara diam-diam dan illegal tanpa menyebut dan mempopulerkan nama gerakannya, maka terutama kepada kawan-kawan yang menjadi korban yang kini masih ada, teruskanlah perjuangan dan marilah kita renungkan dengan segenap hati dan pikiran serta kenangan dalam doa untuk kawan-kawan yang telah tiada, yang jasadnya berserakan dibumi nusantara, tanpa nisan dan tanda. Terima kasih kita kepada kawan-kawan korban fasis Soeharto, yang selama hidupnya tetap gigih dan berjuang membukakan kepada dunia akan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Jenderal Fasis Soeharto, yang kini telah meninggal mendahului kita seperti kawan-kawan A. Umar Said, Ibrahim Isa, Suar Suroso dan Soemaun Utomo dan banyak lagi yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih kawan, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memperhatikan anda semua ditempat abadi, dan semoga generasi muda mengingat jasa dan meneruskan perjuanganmu dan semoga juga para

dajal pembunuh bangsa akan mendapat ganjarannya, baik dari Negara maupun dari Allah YME. Dan bagi kita semua, untuk perjuangan kita marilah senantiasa mengingat dan jangan lupa pesan Bung Karno: “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”.

**Y.T. Taher –Australia – 16 September 2017**

ariyanto@bigpond.com